

ESPA4420  
Edisi 2

MODUL 01

# Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional

Dr. Mahyus Ekananda

# Daftar Isi

<b>Modul 01</b>	<b>1.1</b>
Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional	
<b>Kegiatan Belajar 1</b>	<b>1.4</b>
Sistem Transaksi Internasional	
<b>Latihan</b>	<b>1.22</b>
<b>Rangkuman</b>	<b>1.23</b>
<b>Tes Formatif 1</b>	<b>1.23</b>
<b>Kegiatan Belajar 2</b>	<b>1.26</b>
Neraca Pembayaran Internasional	
<b>Latihan</b>	<b>1.66</b>
<b>Rangkuman</b>	<b>1.68</b>
<b>Tes Formatif 2</b>	<b>1.69</b>
<b>Kunci Jawaban Tes Formatif</b>	<b>1.71</b>
<b>Glosarium</b>	<b>1.72</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>1.74</b>



## Pendahuluan

S embahasan Manajemen Keuangan Internasional diawali dengan pemahaman bahwa masalah ekonomi dan keuangan di dunia modern saat ini tidak lepas keterkaitan permasalahan ekonomi dan keuangan antarnegara. Modul ini akan membahas secara bertahap melalui sembilan modul mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Dalam modul ini, akan dibicarakan lingkungan keuangan internasional. Secara spesifik, modul ini membicarakan tiga topik kegiatan belajar: (1) pengertian dan lingkup manajemen keuangan internasional, (2) pengertian perusahaan multinasional, dan (3) neraca pembayaran yang meliputi aliran perdagangan internasional dan aliran modal internasional.

- 1) Mata kuliah ini membicarakan berbagai topik yang berkenaan dengan masalah pengelolaan keuangan internasional yaitu manajemen keuangan internasional. Pembahasan topik ini menjadi terasa penting dengan semakin majunya keterkaitan bisnis dan ekonomi antarnegara di dunia. Susunan modul ini diarahkan agar mahasiswa mampu melakukan analisis pada masalah risiko, eksposur dalam valuta asing, bentuk investasi internasional dan penganggaran modal dengan sebelumnya mahasiswa mampu untuk menjelaskan berbagai fenomena dan masalah dalam manajemen keuangan internasional pada berbagai buku acuan umum.
- 2) Dengan demikian, pelajaran manajemen keuangan internasional mempunyai relevansi yang cukup tinggi dengan kondisi dunia sekarang ini. Setelah mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan mampu menjelaskan lingkungan keuangan internasional secara lebih spesifik. Sedangkan secara khusus setelah menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan:
  1. lingkungan keuangan internasional;
  2. pasar valuta dan instrumen keuangan internasional;
  3. perilaku dan sistem nilai tukar;
  4. instrumen derivatif valuta asing;
  5. hubungan variabel-variabel keuangan internasional;
  6. risiko yang terjadi pada transaksi keuangan internasional dan nilai tukar;
  7. eksposur-eksposur dalam valuta asing;
  8. bentuk investasi dan sistem pendanaan internasional;
  9. struktur modal dan modal kerja internasional.

# Sistem Transaksi Internasional

## A. PENGERTIAN SISTEM PEMBAYARAN

Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank.

Pada pendahuluan modul ini dikemukakan bahwa materi neraca pembayaran internasional adalah transaksi-transaksi ekonomi internasional yang diadakan oleh penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Pada umumnya transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindahtanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain.

## B. CARA DAN ALAT TRANSAKSI INTERNASIONAL

Pada umumnya dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausula tentang tata cara pembayaran. Pembayaran (penyerahan sejumlah uang) merupakan salah satu bentuk prestasi terpenting yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Di pihak lain pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan (sengketa) dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat.

Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan, dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan keringan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam transaksi ekspor impor, dipilihnya cara pembayaran *advance payment* (pembayaran di muka) akan memberikan kemudahan bagi eksportir, karena pembeli (importir) terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh

penjual (eksportir). Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut.

### 1. *Advance Payment/Cash Payment*

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan *check/cheque* atau *bank draft*, pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang dimuka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan.

*Advance payment* merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem *advance payment* biasa dikenal dengan sebutan pembayaran dimuka, karena melalui cara ini pembeli (importir) membayar terlebih dahulu kepada penjual (eksportir) melalui perintah transfer bank ke rekening penjual (eksportir), sebelum penjual (eksportir) yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebahagian baru kemudian penjual (eksportir) melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui *port of loading*. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama pembeli (importir).

Cara pembayaran dengan *advance payment* mempunyai beberapa variasi sesuai dengan jumlah harga yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli (importir). Adakalanya pembeli membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan pengiriman harga tersebut, maka pembeli (importir) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sepanjang mengenai pembayaran dan oleh karena itu, tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh pembeli (importir). Cara ini dikenal dengan istilah *payment with order*.

Variasi lain adalah *partial payment with order*. Sesuai dengan namanya, dalam sistem pembayaran ini pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya akan dibayar oleh penjual setelah penjual melakukan kewajibannya mengirimkan barang. Penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem *collection*.

Cara pembayaran dengan mempergunakan sistem pembayaran *advance payment* mengandung resiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh importir yang terlebih dahulu melakukan pembayaran. Bisa saja terjadi wanprestasi dari penjual yang berakibat fatal bagi pembeli, misalnya penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu yang diperjanjikan, atau penjual mengirimkan barang yang kualifikasinya dan mutunya

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi seperti ini harus diperkuat dengan berbagai klausula yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausula tentang ganti rugi atau sanksi.

Perlu diperhatikan bahwa cara pembayaran dengan *advance payment* umumnya dipilih oleh para pihak dalam kontrak bisnis apabila antara para pihak terdapat hubungan bisnis yang sudah berjalan baik. Dengan kata lain, kontrak bisnis yang terjadi umumnya bukan hubungan bisnis yang pertama bagi para pihak. Cara ini baru bermanfaat apabila para pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sering melakukan transaksi atau bila pembeli telah mengenal sebelumnya *performance* dari penjual.

## 2. *Open Account*

Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran *cash*. Dengan cara *open account*, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.

Dengan metode ini maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima, atau kebalikan dari sistem *advance payment*. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual (eksportir) mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima. Pengiriman uang dilakukan melalui bank. Cara pembayaran dengan *open account* merupakan kebalikan dari *advance payment*. Jika pada *advance payment* pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang maka pada *open account* penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual.

Dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pembeli (importir). Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir. Cara pembayaran dengan *open account* akan sangat menguntungkan bagi pembeli, karena melalui sistem ini pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran.

Di sisi lain resiko dapat muncul di pihak penjual, misalnya barang telah dikirimkan penjual ke pelabuhan tempat kedudukan pembeli, akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Dengan

sendirinya penjual akan rugi karena telah menanamkan modal atas harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ongkos pengangkutan dan biaya asuransi.

Sama seperti cara pembayaran *advance payment* maka cara pembayaran dengan *open account* jarang dipergunakan oleh pihak-pihak yang belum saling mengenal dengan baik reputasi mitra kontraknya. Oleh karena cara ini sangat menguntungkan pembeli maka pada umumnya cara pembayaran *open account* banyak dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Dengan cara pembayaran kemudian maka induk perusahaan sebenarnya telah memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan. Keuntungan cara pembayaran seperti ini sama seperti pada pembayaran dengan *advance payment* yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan.

### 3. *Letter of Credit*

L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). Dengan demikian L/C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam L/C adalah *opener* (importir), *issuer* (bank yang mengeluarkan L/C), *beneficiary* atau penjual (eksportir), dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu *confirming bank*, yaitu bank di negara eksportir. Pada saat ini lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan L/C karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain adanya:

1. jaminan pembayaran bagi eksportir/penjual,
2. jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C,
3. fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan, dan
4. fasilitas *hedging*.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam L/C adalah sebagai berikut.

1. Sifat L/C, apakah *revocable* atau *irrevocable*.
2. Tanggal *expired* L/C.
3. Tanggal pengapalan.
4. Syarat-syarat dalam L/C, misalnya apakah dapat dilakukan *transshipment* atau *partial shipment*.

Dibawah ini contoh format L/C umum yang sering digunakan untuk transaksi bisnis.

## CALL FOR BIDS NO. NS12-1

## PART E —SAMPLE FORM OF IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT

**NOTE: The Letter of Credit must be issued by a bank found in Schedule I or II of the Bank Act (S.C. 1991, c. 46).**

(DATE OF ISSUE)

IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT NO. (L/C NO.) FOR (\$ AMOUNT CAD.)

**BENEFICIARY**

THE CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM BOARD  
1791 BARRINGTON STREET,  
18<sup>TH</sup> FLOOR, TD CENTRE  
HALIFAX, NS, B3J 3K9  
ON BEHALF OF THE RECEIVER GENERAL OF CANADA

**APPLICANT**

(Name & Address)

**AMOUNT** \$ \_\_\_\_\_ CAD.  
(amount in words)---00/100 Canadian Dollars

**EXPIRY DATE**

At the request of and for the account of our customer (**Applicant - Name and Address**) the "Customer", we hereby establish in the Beneficiary's favour our Irrevocable Standby Letter of Credit number (**L/C NO.**) for a sum not exceeding in the aggregate amount of (**Amount in Words**)---00/100 Canadian Dollars (\$ \_\_\_\_\_ CAD.).

This Credit is given in accordance with paragraph 2.6(b) of Call for Bids No. NS12-1 (Parcel #\_\_\_), made by the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board on April 16, 2012 and relates to the terms and conditions in the Licence dated January 15, 2013, equal in the amount to the sum of this Credit.

Our obligation to pay is irrevocable, absolute and unconditional and, in furtherance and support thereof and without limiting the irrevocable, absolute and unconditional nature of our obligations to the Beneficiary hereunder, any demand by the Beneficiary shall be honoured without any inquiry as to the Beneficiary's rights to make such demand, without regard to or recognition of any contractual rights, claims or defences (legal or equitable) of the Customer against the Beneficiary and without regard to any other defence to the Beneficiary's demand for payment, arising as a result of any dispute between the Beneficiary and the Customer or between the Customer and ourselves.

Payment under this Irrevocable Standby Letter of Credit shall be available to the Beneficiary on sight against presentation by the Beneficiary to (*issuing Bank, name and address*) of a written demand for payment, which demand we shall honour without inquiring whether the Beneficiary

Sumber: Government of Canada Nova Scotia Offshore Petroleum Board (2018).  
<https://www.cnsopb.ns.ca/departement/cnsopb>

Gambar 1.1  
Contoh Letter of Credit

Pembayaran transaksi dengan mempergunakan L/C merupakan cara pembayaran yang paling umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang (*sales of good*). Cara pembayaran dengan mempergunakan L/C terlebih dahulu dicantumkan dalam *sales contract*. Berdasarkan klausula cara pembayaran dengan L/C yang tercantum dalam kontrak inilah selanjutnya pembeli (importir) mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya (*opening bank*) untuk manfaat penjual. *Opening bank* selanjutnya akan mengirim surat L/C kepada *beneficiary* melalui bank korespondennya di negara penjual (*eksportir*). Bank Koresponden/*advising bank* kemudian memberi tahu *beneficiary* bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut kemudian penjual (eksportir) mengirimkan barang kepada pembeli. Dokumen-dokumen asli mengenai barang tersebut diserahkan kepada *advising bank* dan duplikatnya dikirimkan kepada pembeli. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, maka *advising bank* akan

melakukan pembayaran. Dokumen yang diterima dan telah diperiksa oleh advising bank kemudian dikirim ke opening bank (*issuing bank*) dan setelah itu issuing bank melakukan pembayaran kepada advising bank. Pembuka kredit (*importir*) membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi bahwa semua dokumen telah datang. Issuing akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut.

Dengan mempergunakan L/C pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman.

#### 4. *Commercial Bills of Exchange*

Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut *draft* atau *trade bills*, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut *trade drafts*. Jenis *draft* terdiri dari; *clean draft* dan *documentary draft*.

Draft No. MD-01  
For USD30,804.70  
Date: APR 30 2008  
At \*\*\*\*\* sight of this FIRST of Exchange (Second the same tenor and date being unpaid)  
Pay to the order of COMMERCIAL BANK, LTD.  
the sum of SAY TOTAL U.S. DOLLARS THIRTY THOUSAND EIGHT HUNDRED FOUR AND CENTS SEVENTY ONLY.  
value received  
Drawn under  
Irrevocable L/C No. 073708010006 dated JANUARY 28, 2008  
To AUTO CO. LTD.  
Daniel  
AUTHORIZED SIGNATURE

Sumber: BankAllInfo (2018) <http://bankallinfo.org/>

Gambar 1.2  
Contoh *Commercial Bills of Exchange*

*Commercial bills of exchange* yang sering disebut juga wesel (*draft*) atau *trade bills*, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel.

#### 5. *Collection*

*Collection* merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam *collection*, penjual (*eksportir*) bertindak sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada

importir (pembeli). Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan (*remitting bank*) setelah menerima dokumen akan meneruskan *collection*. *Remitting bank* setelah menerima dokumen *collection* selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke *collecting bank* dengan menggunakan *collection instruction*. *Collection bank* inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar (*drawee*).

Dalam hal *collection bank* belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada *drawee* maka *collection bank* bisa meneruskan ke bank lain (*presenting bank*) yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan *drawee*. Setelah *drawee* melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada *collection bank* atau *presenting bank* maka *collection bank* akan meneruskan kembali kepada *remitting bank*. *Remitting bank* inilah yang akan melakukan pembayaran kepada *principal*.

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi dengan mempergunakan *collection*, *International Chamber of Commerce (ICC)* menerbitkan *Uniform Rules for Collection (URC)*, yang terakhir direvisi pada tahun 1995 tercatat dengan nomor publikasi 522 (*URC 522*). Berdasarkan *URC 522* cara pembayaraan dengan *collection* dapat terjadi dengan dua kondisi, yaitu: *document againt payment* dan *document againt acceptance*.

Dalam *document againt payment*, penjual (eksportir) menahan dokumen-dokumen pemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah adanya pembayaran dari pembeli (importir). Sedangkan dalam *document againt acceptance* eksportir (penjual) akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli (importir) telah melakukan akseptasi.

## 6. Konsinyasi

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan *open account*. Melalui konsinyasi penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan *open account* adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada *open account* pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengrimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung resiko yang sangat besar bagi penjual. Kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanpretasi antara lain:

- a. pembeli tidak membayar harga kepada penjual; atau
- b. pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, pembeli mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut, atau;

- c. bila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada penjual bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga.

Oleh karena besarnya kemungkinan resiko yang mungkin dialami oleh penjual, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Pengenalan yang baik tentang berbagai bentuk klausula ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian. Juga sangat penting diatur tentang mekanisme pengawasan dalam kontrak-kontrak konsinyasi.

Mengingat resiko dalam kontrak konsinyasi maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing, dan yang terpenting para pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerjasama bisnis lainnya.

Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi penjual (eksportir), akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu, bagi importir, sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.

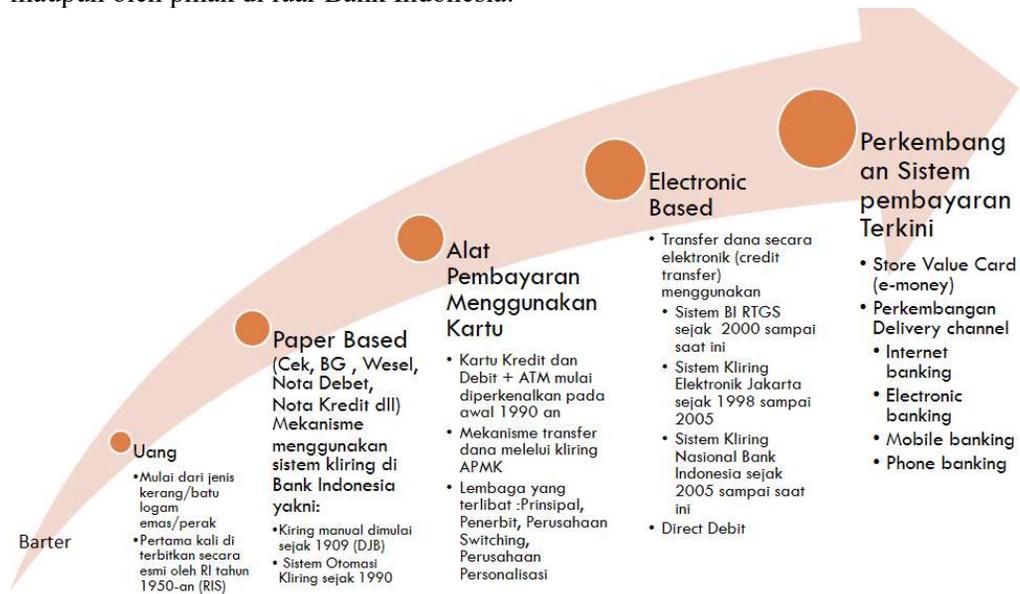
### **C. CARA DAN ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA**

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikutan aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 memberikan dampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian Indonesia selama tahun tersebut. Kegiatan ekonomi yang paling dominan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi swasta domestik, meskipun kegiatan investasi dan perdagangan internasional (net ekspor) juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Kegiatan ekonomi selama tahun 2010 tentunya sangat berpengaruh pada aktivitas sistem pembayaran. Nilai transaksi transfer dana yang melalui sistem pembayaran selama periode laporan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk nilai transaksi pembayaran selama tahun 2010 mencapai 58,05 ribu triliun atau meningkat 27,8%

dibandingkan tahun 2009. Sementara itu, volume transaksi pembayaran mencapai 2,14 miliar transaksi atau meningkat 15,46%.

Untuk mendukung lancarnya aktivitas pembayaran, inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran banyak tercipta sebagai dampak positif dari perkembangan teknologi informasi. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna. Namun demikian, diperlukan suatu kebijakan dari Bank Indonesia untuk selalu menjaga dan meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan aspek perlindungan konsumen. Penguatan dari sisi infrastruktur menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pembayaran di tahun 2010. Persiapan menghadapi era integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terus dilakukan dan menjadi faktor utama dalam penguatan infrastruktur sistem pembayaran, baik sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh pihak di luar Bank Indonesia.



Gambar 1.3  
Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dijelaskan pada Gambar 1.3. Dimulai dari cara barter sampai *store value card*. (*e-money*).

### 1. Instrumen Pembayaran

Instrumen/alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan nontunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran

nontunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran nontunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran nontunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini mulai dikembangkan pula berbagai alat pembayaran yang menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan *electronic money*. Penggunaan masing-masing alat pembayaran ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda terhadap berbagai aspek, seperti aspek hukum, teknis, system, dan mekanisme operasional dan lain-lain.

a. *Tunai/Cash*

Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Dengan menggunakan uang tunai maka jika seseorang melakukan jual beli barang dan atau jasa maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya.



Gambar 1.4  
Transaksi Uang Tunai

Jika semua pembelian barang dan atau jasa menggunakan uang tunai maka semua pelaku ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Supaya lebih efisien dan lebih aman maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang penggunaannya melibatkan lembaga perantara yaitu bank.

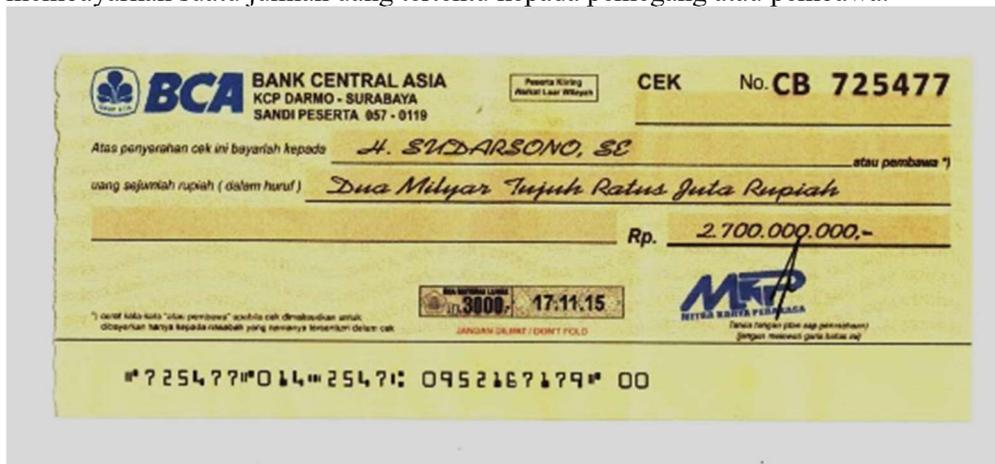
b. *Non-Tunai/cashless*

Pembayaran nontunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas

pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit dan lain-lain.

c. *Cek*

Cek yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pengertian secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa.



Gambar 1.5  
Bentuk Cek Salah Satu Bank

Beberapa pihak yang terkait sehubungan dengan penggunaan cek adalah sebagai berikut.

1. Penerbit (*drawer*): Orang yang mengeluarkan surat cek.
2. Tersangkut: yaitu bank yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pemegang (*holder*): orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek.
4. Pembawa (*bearer*): orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. (Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas unjuk yang berlaku bagi surat cek).
5. Pengganti: orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endosemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama pengganti dalam surat cek.

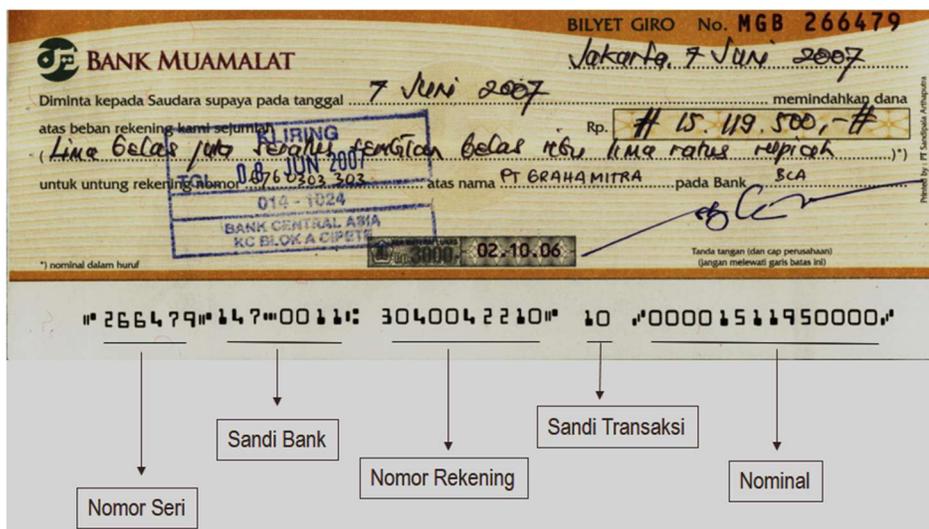
Adapun syarat formal cek menurut KUHD adalah sebagai berikut.

1. Nama cek, yang dimuat dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam mana cek itu disebutkan.

2. Perintah tak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu.
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut).
4. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus terjadi.
5. Penyebutan hari penanggalan beserta tempat dimana cek diterbitkan.
6. Tanda tangan orang yang menerbitkan cek (penerbit).

d. *Bilyet Giro*

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah (bank tertarik) untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.



Gambar 1.6  
Bilyet Giro

Penggunaan bilyet giro tidak diatur dalam KUHD melainkan dalam SK No.28/32/KEP/DIR dan SE No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Adapun syarat formal bilyet giro menurut SK tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan.
2. Nama tertarik.
3. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik.
4. Nama dan nomor rekening pemegang.
5. Nama bank penerima.
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnyanya.
7. Tempat dan tanggal penarikan.

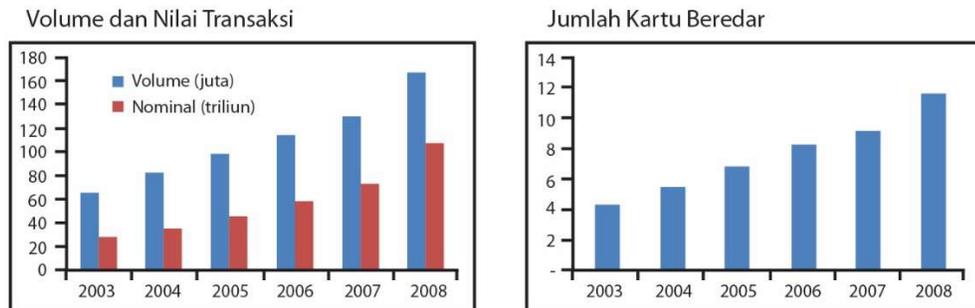
8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap, stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening.

e. *Kartu Kredit (credit card)*

Adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Dalam penyelenggaraan kartu kredit ini terdapat beberapa pihak yang terlibat.

1. Penerbit (*issuer*), yaitu pihak yang menerbitkan kartu kredit. Dalam hal ini, issuer merupakan pihak yang mengadakan perjanjian dengan dan yang memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu.
2. Pengelola (*acquirer*), yaitu pihak yang mengadakan hubungan atau kerjasama dengan pedagang.
3. Prinsipal adalah pihak pemilik hak tunggal atas merk dalam penyelenggaraan kartu kredit seperti Visa, Master Card, Diners dan lain-lain.

Setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal transaksi yang dilakukan. Otorisasi ini biasanya dilakukan secara *on-line* dengan meng-insert kartu melalui terminal EDC/POS (*Electronic Data Capture/Point of Sales*) yang ada di pedagang.

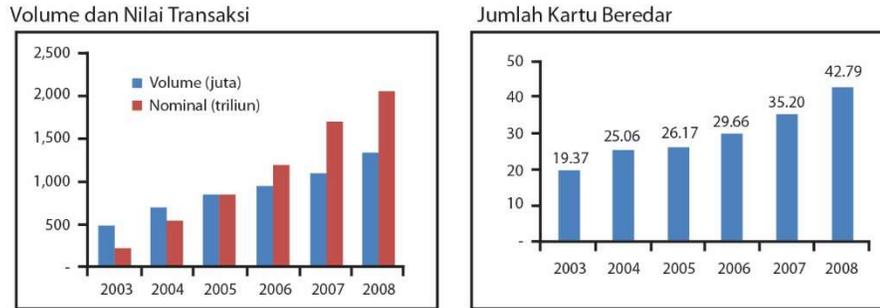


Gambar 1.7  
Perkembangan Transaksi Kartu kredit

f. *Kartu debet (debet card)*

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debet akan mengurangi langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Jadi, dalam hal ini tidak ada fasilitas kredit yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu. Sebagaimana halnya kartu kredit, mekanisme pembayaran dengan kartu debet juga memerlukan proses otorisasi serta ditambah dengan penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) oleh pemegang kartu.

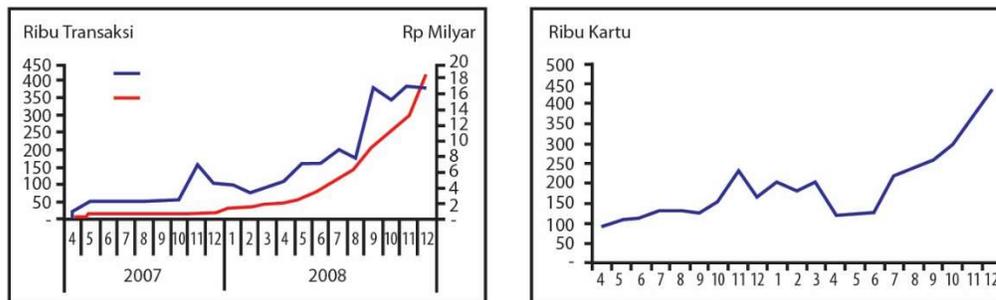
Perkembangan Transaksi Kartu Account Based (ATM, ATM/Debet)



Gambar 1.8  
Perkembangan Transaksi Kartu Account Based (ATM, ATM/Debet)

g. *Electronic Money (e-money)*

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronis (*electronic payment*). Beberapa contoh pembayaran elektronis yang sudah dikenal di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, internet banking, pembayaran dengan kartu kredit serta kartu debit/kartu ATM.



Gambar 1.9  
Perkembangan Transaksi E-Money

Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, namun kesemua cara pembayaran elektronis yang disebutkan di atas selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah dengan menggunakan salah satu cara pembayaran tersebut selalu memerlukan proses otorisasi untuk kemudian akan dibebankan langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan.



Gambar 1.10  
Jenis-jenis E-Money

Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money* atau sering disebut dengan *e-money*, yang karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya karena pembayaran dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah yang menggunakannya. Hal ini dikarenakan pada *e-money* tersebut telah terekam sejumlah nilai uang. Dengan karakteristik tersebut, pada prinsipnya seseorang yang memiliki *e-money* sama dengan memiliki uang tunai. Hanya saja nilai uang tersebut dikonversikan dalam bentuk elektronik. Dalam salah satu laporan yang diterbitkan oleh BIS pada bulan Oktober 1996, *e-money* didefinisikan sebagai produk-produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah dana disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik yang dimiliki oleh seseorang. Nilai elektronik ini dapat dibeli oleh seseorang dan tersimpan dalam peralatan elektronik miliknya dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran. Berbeda dengan kebanyakan *single-prepaid card* yang ada saat ini (seperti kartu telepon), *e-money* dimaksudkan untuk berbagai keperluan pembayaran. Dilihat dari media yang digunakan, secara umum ada dua tipe produk *e-money*.

1. *Prepaid card* (disebut juga *electronic purses*), dengan karakteristik sebagai berikut: 1) nilai elektronik disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu; 2) mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan memasukkan kartu ke suatu *card reader*.
2. *Prepaid software* (sering disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik sebagai berikut: a) nilai elektronik disimpan dalam suatu *hard disk* komputer; b) mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Perkembangan *e-money* di berbagai negara telah menimbulkan issue seputar implikasinya terhadap kebijakan bank sentral, antara lain implikasi terhadap kebijakan moneter, pendapatan *seigniorage* bank sentral, kelembagaan yang dapat menerbitkan *e-money*, *security*, dan *money laundering*.

Dari sisi perluasan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa mendorong industri sistem pembayaran untuk memperluas cakupan layanan sistem pembayaran sehingga dapat lebih luas dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Selain itu, perluasan akses dalam sistem pembayaran dapat mendorong terwujudnya program keuangan inklusif bagi lapisan masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan.

Tabel dibawah ini menjelaskan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia pada tahun 2012.

Tabel 1.1  
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia tahun 2012

NILAI (Rp Triliun)	2011	2012	YoY
<b>RTGS</b>	<b>66.921,85</b>	<b>99.397,11</b>	<b>48,53%</b>
Pengelolaan Moneter	30.782,68	60.497,66	96,53%
Transaksi Pemerintah	3.276,34	3.804,57	16,12%
Transfer Masyarakat	13.176,74	15.268,78	15,88%
Setelmen Pasar Modal	2.097,71	2.169,73	3,43%
Valas Antar Bank	3.425,24	2.715,55	-20,72%
PUAB	5.403,79	4.740,46	-12,28%
Lain-Lain	8.759,35	10.200,36	16,45%
<b>KLIRING</b>	<b>1.970,61</b>	<b>2.170,19</b>	<b>10,13%</b>
Debet	1.412,21	1.537,95	8,90%
Cek	181,67	204,71	12,68%
BG	1.230,03	1.332,75	8,35%
Instrumen debet lainnya	0,51	0,49	-3,92%
Kredit	558,39	632,24	13,23%
<b>APMK &amp; Uang Elektronik</b>	<b>2.660,62</b>	<b>3.268,89</b>	<b>22,86%</b>
K.ATM/Debet	2.477,04	3.065,08	23,74%
K.Kredit	182,60	201,84	10,54%
E-Money	0,98	1,97	101,02%
<b>Total Transaksi Pembayaran</b>	<b>71.553,08</b>	<b>104.836,19</b>	<b>46,52%</b>

Sumber data : EDW BI-RTGS

Secara umum sistem pembayaran dibagi menurut RTGS, Kliring, Uang elektronik.

Dengan mengedepankan empat aspek utama, yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen, kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia selama 2012 dilakukan melalui persiapan implementasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, pengembangan NPG, interkoneksi dalam penyelenggaraan uang elektronik, persiapan implementasi standar nasional kartu ATM dan ATM/Debet



berbasis chip, perluasan akses BPR dalam sistem pembayaran, serta penyempurnaan ketentuan untuk lebih meningkatkan penerapan aspek perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran.

Kebijakan penguatan infrastruktur untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan Bank Indonesia dengan melakukan persiapan implementasi Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Pengembangan ini dilakukan untuk mengimbangi tren peningkatan jumlah transaksi BI-RTGS dan BI-SSSS dari waktu ke waktu yang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, pengembangan ini juga dilakukan sebagai persiapan untuk mengantisipasi konektivitas Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan infrastruktur sistem keuangan lainnya baik domestik.

## 2. Aspek Keamanan

Selain itu, kebijakan untuk peningkatan keamanan juga dilakukan melalui persiapan implementasi standar nasional kartu ATM/Debet menggunakan teknologi *chip* dan *personal identification number* (PIN) paling kurang 6 (enam) digit. Penggunaan standar nasional kartu ATM dan ATM/Debet dengan menggunakan teknologi chip ditargetkan dapat diterapkan secara menyeluruh pada akhir 2015. Teknologi chip dinilai mampu mengurangi kejahatan (fraud) yang dilakukan melalui infrastruktur sistem kartu ATM dan ATM/Debet, yang antara lain dilakukan dengan metode *skimming*. Kebijakan ini tentunya juga ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna kartu ATM dan ATM/Debet.

## 3. Aspek Efisiensi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia terus mendorong interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran ritel melalui pengembangan NPG. Terwujudnya NPG akan membantu pemantauan risiko penyelenggaraan sistem pembayaran dan akan membentuk database sistem pembayaran ritel secara nasional yang dapat mendukung pengambilan keputusan bagi otoritas yang berwenang. Kebijakan interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembayaran dan transfer dana. Dengan interkoneksi sistem pembayaran, masyarakat tidak harus memiliki banyak APMK dan uang elektronik, karena hanya dengan satu kartu atau satu uang elektronik, masyarakat dapat melakukan kegiatan pembayaran dan transfer dana melalui berbagai alternatif infrastruktur sistem pembayaran yang ada.

## 4. Aspek Perluasan Akses

Selanjutnya untuk meningkatkan perluasan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia turut aktif dalam pengembangan sistem transfer kredit elektronik (STKE). Akses BPR dalam sistem pembayaran semakin luas karena BPR di wilayah Jawa Timur, baik untuk kepentingan BPR sendiri maupun nasabahnya, telah dapat

memanfaatkan layanan sistem pembayaran yang cepat dan aman dengan biaya relatif murah melalui STKE. STKE dikembangkan oleh Bank Jatim sebagai bank pengayom BPR (APEX BPR) di wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan Bank Indonesia. STKE merupakan suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer dana antar anggota APEX BPR dan/atau dengan bank umum melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

## 5. Aspek Perlindungan Konsumen

Selanjutnya, upaya Bank Indonesia terkait aspek perlindungan konsumen dilakukan antara lain melalui penyempurnaan ketentuan yang lebih memperhatikan aspek perlindungan konsumen, yaitu penyempurnaan ketentuan APMK yang dilakukan Bank Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (PBI APMK) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal Perubahan SEBI No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam PBI dan SEBI tersebut antara lain meliputi pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit. Batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan jumlah maksimum penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit), penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi (penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit serta pengenaan biaya dan denda, pengaturan kerjasama dengan pihak lain, khususnya yang terkait dengan penagihan utang kartu kredit).

## 6. Aspek Pengembangan

Pengembangan NPG ke depan akan dilakukan melalui tiga tahapan besar. Tahap pertama, adalah pengembangan instrumen pembayaran yang paling dominan digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu kartu ATM dan ATM/Debet dengan menginterkoneksi jaringan penyelenggara kartu ATM dan ATM/Debet di Indonesia. Tahapan kedua adalah pengembangan instrumen pembayaran pada kartu kredit dan uang elektronik melalui pemrosesan kartu kredit secara domestik untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia tanpa harus diteruskan kepada Prinsipal luar negeri seperti yang berlaku saat ini. Sementara itu, untuk perluasan cakupan transaksi menggunakan uang elektronik akan didukung melalui interkoneksi diantara penerbit uang elektronik. Selanjutnya tahap terakhir adalah pengembangan layanan Mobile Financial Services (MFS) dan e-commerce. Modul layanan ini akan mendukung konvergensi layanan transaksi berbasis mobile serta e-commerce di masa datang.



## Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Buatlah definisi dan ruang lingkup dari (a) transfer unilateral swasta, dan (b) transfer unilateral pemerintah!
- 2) Jawablah pertanyaan berikut ini. (a) Apa yang diukur oleh neraca modal Indonesia? (b) Dalam bentuk apa arus keluar modal dari Indonesia itu? (c) Dalam bentuk apa saja arus masuk modal ke Indonesia itu?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) (a) Pembayaran transfer (*transfer unilateral*) swasta merupakan pemberian-pemberian yang dibuat oleh individu dan institusi nonpemerintah kepada penduduk negara-negara lain. Pembayaran transfer swasta yang dibuat oleh penduduk Indonesia (debit) dapat berbentuk kontribusi individu kepada dana pertolongan kelaparan untuk negeri yang kurang maju, pengiriman-pengiriman uang dari imigrasi di Indonesia kepada keluarga-keluarganya di kampung halaman atau paket CARE yang dikirim kepada anak-anak kurang gizi di negara yang miskin.
- (b) Pembayaran transfer pemerintah merupakan pemberian atau pembayaran lain (yang tidak langsung diterima kembali) yang dibuat oleh pemerintah satu negara kepada individu, institusi atau pemerintah negara lain. Pembayaran transfer yang dibuat oleh pemerintah Indonesia (debit) dapat berbentuk bantuan ekonomi (seperti bantuan uang, barang-barang konsumsi, peralatan modal atau bantuan teknik) kepada negara-negara yang kurang maju; bantuan militer (biasanya dalam bentuk peralatan militer), dan pengiriman uang para pensiun usia lanjut dan pembayaran-pembayaran lain yang sama kepada para pekerja luar negeri Indonesia yang pensiun luar negeri. Saldo pembayaran transfer pemerintah Indonesia adalah -\$13 milyar dalam tahun 1988 dan -\$15 milyar untuk pembayaran transfer swasta dan pemerintah secara bersama-sama.
- 2) (a) Neraca modal Indonesia mengukur perubahan aset Indonesia di luar negeri dan aset luar negeri di Indonesia, selain dari aset cadangan pemerintah. Jadi, bila neraca transaksi berjalan mengukur arus barang-barang, jasa-jasa dan pembayaran transfer, maka neraca modal mengukur perubahan dalam stok dan semua aset keuangan yang bukan berupa cadangan. Pemisahan aset cadangan pemerintah dari rekening modal disebabkan oleh perubahan

dalam cadangan (*reserves*) mencerminkan kebijakan pemerintah, bukan kekuatan-kekuatan pasar.

- (b) Arus keluar modal dari Indonesia dapat berbentuk kenaikan aset Indonesia di luar negeri (seperti Indonesia membeli saham-saham luar negeri) atau pengurangan aset luar negeri di Indonesia (seperti penjualan saham-saham Indonesia oleh orang asing). Keduanya adalah keluar modal dan dicatat sebagai debit (-) karena keduanya mengakibatkan pembayaran kepada orang asing. Perhatikanlah bahwa rekening modal hanya memasukkan perubahan dalam persediaan aset keuangan yang bukan cadangan. Perubahan dalam cadangan aset keuangan atau cadangan internasional termasuk dalam rekening pemerintah.
- (c) Arus masuk modal ke Indonesia dapat berbentuk pengurangan aset luar negeri Indonesia (seperti penjualan saham-saham luar negeri Indonesia) atau kenaikan aset luar negeri di Indonesia (seperti penjualan saham-saham luar negeri Indonesia oleh orang asing). Keduanya merupakan arus masuk modal dan dicatat sebagai kredit (+) keduanya mengakibatkan penerimaan dari pembayaran orang asing. Sekali lagi, rekening modal hanya memasukkan perubahan dalam aset keuangan bukan cadangan.



## Rangkuman

Neraca pembayaran meringkaskan secara sistematis transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya (sisa dunia) selama periode tertentu. Pembicaraan mengenai neraca pembayaran membahas beberapa hal mengenai: (1) struktur neraca pembayaran, (2) ketidakseimbangan neraca pembayaran dan mekanisme penyesuaian, (3) aliran barang, jasa dan modal, dan (4) strategi menghadapi defisit transaksi berjalan.



## Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Transaksi ekonomi dimasukkan dalam neraca pembayaran sebagai kredit jika hal itu merupakan ....
  - A. penerimaan pembayaran dari pihak asing
  - B. pembayaran kepada orang asing
  - C. baik penerimaan maupun pembayaran
  - D. bukan penerimaan juga bukan pembayaran

- 2) Salah satu transaksi berikut adalah debit dalam neraca transaksi berjalan, yaitu....
  - A. ekspor barang
  - B. ekspor jasa
  - C. kiriman kepada pihak asing
  - D. kiriman dari pihak asing
  
- 3) Pembelian saham Indonesia oleh Inggris menunjukkan ....
  - A. kredit dalam neraca transaksi berjalan Amerika
  - B. debit dalam neraca modal jangka Indonesia
  - C. kredit dalam neraca cadangan pemerintah Indonesia
  - D. kredit dalam neraca modal Indonesia
  
- 4) Pembayaran dividen oleh perusahaan Indonesia kepada pemegang saham luar negeri menunjukkan ....
  - A. debit dalam neraca modal Indonesia
  - B. kredit dalam neraca modal Indonesia Serikat
  - C. kredit dalam neraca cadangan pemerintah Indonesia
  - D. debit dalam neraca transaksi berjalan Indonesia
  
- 5) Dari sudut pandang Indonesia, penarikan atas (pengurangan dari) saldo bank luar negeri di bank New York menunjukkan ....
  - A. arus masuk modal
  - B. arus ke luar modal
  - C. arus ke luar cadangan pemerintah
  - D. debit dalam neraca transaksi berjalan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

# Neraca Pembayaran Internasional

## A. PENGERTIAN NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antarpenduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan (individu), perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain.

Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Sementara sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Semua transaksi kredit masuk dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+). Sedangkan transaksi debit masuk dengan tanda negatif (-).

Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antarwarga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu maupun negara. Isi laporan neraca pembayaran yang paling penting adalah neraca berjalan dan neraca modal. Membandingkan investasi ke luar negeri (negatif/ debit) dan investasi asing ke dalam negeri (positif/ kredit) dalam periode tertentu.

Neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasanya juga disebut neraca pembayaran, neraca pembayaran luar negeri, *balance of payments*, *balance of international payments*, atau *international balance of payments*, biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematis yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan, untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Pippenger (1973), Neraca Pembayaran Internasional (NPI) memiliki sebutan-sebutan lain seperti Neraca Pembayaran (NP) atau Neraca Pembayaran Luar Negeri (NPLN). Soediyono (1987) menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris NPI disebut *Balance of Payments (BOP)* atau *Balance of International Payments (BIP)* atau *International Balance of Payments (IBP)*. Untuk konsistensi dalam disertasi ini istilah yang dipakai adalah Neraca Pembayaran Internasional (NPI).

Walaupun NPI memiliki banyak sebutan, namun menurut Duasa (2000) kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Pengertian tersebut dapat dilihat dari definisi berikut. NPI didefinisikan sebagai suatu catatan atau ikhtisar yang tersusun secara sistematis tentang semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk suatu negara dalam kurun waktu satu (1) tahun. Transaksi ekonomi tersebut meliputi kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, arus masuk, dan keluarnya modal, hibah dan pembayaran transfer lain (lihat juga Lanciaux, 1990; Blejer, *et al.*, 1995; Nwaobi 2003 ).

**B. KOMPONEN NERACA PEMBAYARAN**

Struktur NPI suatu negara dapat dilihat pada Tabel 1.2. Struktur tersebut merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

Tabel 1.2  
Struktur Neraca Pembayaran Internasional

<i>Balance of Payment</i>	<i>Credits</i>	<i>Debits</i>
<i>Current Account</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Exports of goods &amp; non-factor services</i></li> <li>◆ <i>Exports of factor services</i></li> <li>◆ <i>Private unrequited transfer (by nonresidents)</i></li> <li>◆ <i>Emmigrant remittances</i></li> <li>◆ <i>Private grants</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Imports of goods &amp; nonfactor services</i></li> <li>◆ <i>Imports of factor services</i></li> <li>◆ <i>Private unrequited transfer (by residents)</i></li> </ul>
	<i>Official unrequited transfers (by foreign government)</i>	<i>Official unrequited transfers (by national government)</i>
<i>Capital Account</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Foreign direct investment (by non residents) (disinvestment shown as negative)</i></li> <li>◆ <i>Portfolio investment (by non-residents) (amortizations shown as negative)</i></li> <li>◆ <i>Other long-term capital inflows (by nonresidents) (amortizations shown as negative)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <i>Foreign direct investment (by non residents) (disinvestment shown as negative)</i></li> <li>◆ <i>Portfolio investment (by nonresidents) (amortizations shown as negative)</i></li> <li>◆ <i>Other long-term capital outflows (by nonresidents) (amortizations shown as negative)</i></li> </ul>
	<i>Short-term capital inflows</i>	<i>Short-term capital outflows</i>
<i>Reserve Account</i>	<i>Net changes in reserves</i>	

Sumber: World Bank. *World Debt Tables dalam Kuncoro (2009)*

Kemudian Kuncoro (2009) menjelaskan masing-masing unsur NPI tersebut di atas sebagai berikut.

**1. Neraca Barang (Neraca Perdagangan)**

Neraca barang dan neraca jasa disebut juga neraca transaksi berjalan (*current account*). Rekening transaksi berjalan (*current account*) merupakan sub NPI yang

mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran, yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran (menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri). Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain (menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri).

Tabel 1.3  
Neraca Perdagangan/Neraca Barang

	KETERANGAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Q3*	2016 Q4*
1.	Barang <sup>1</sup>	33,825	8,680	5,833	6,983	14,049	3,892	5,095
2.	- Ekspor	191,109	187,346	182,089	175,293	149,124	34,898	40,243
3.	- Impor	-157,284	-178,667	-178,256	-168,310	-135,076	-31,008	-35,148
4.	A. Barang dagangan umum	32,215	6,711	4,069	5,474	13,319	3,675	5,266
5.	1. Nonmigas	32,866	11,950	13,777	17,304	19,023	5,003	6,371
6.	a. Ekspor	151,366	149,768	146,706	145,008	130,541	31,292	36,294
7.	b. Impor	-118,500	-137,816	-132,928	-127,704	-111,518	-26,289	-28,923
8.	2. Minyak	-17,526	-20,436	-22,483	-23,903	-13,106	-2,621	-2,566
9.	a. Ekspor	19,576	17,891	17,889	13,806	7,833	1,631	1,600
10.	b. Impor	-37,102	-38,327	-40,372	-37,709	-20,938	-4,252	-4,166
11.	3. Gas	16,876	15,197	12,775	12,074	7,402	1,293	1,460
12.	a. Ekspor	18,491	17,880	15,700	14,947	9,351	1,638	1,963
13.	b. Impor	-1,615	-2,483	-2,925	-2,873	-1,949	-345	-503
14.	B. Barang lainnya	1,610	1,969	1,765	1,509	730	217	-170
15.	a. Emas nonmoneter	1,610	1,969	1,765	1,509	730	217	-170
16.	a. Ekspor	1,676	2,009	1,795	1,533	1,400	337	386
17.	b. Impor	-67	-41	-31	-24	-670	-120	-556
18.	Memorandum:							
19.	1. Nominal	-	-	-	-	-		
20.	a. Total Ekspor (fob)	191,109	187,346	182,089	175,293	149,124	34,898	40,243
21.	- Nonmigas	153,042	151,775	148,501	146,541	131,941	31,629	36,680
22.	- Migas	38,067	35,571	33,588	28,752	17,184	3,269	3,563
23.	b. Total Impor (fob)	-157,284	-178,667	-178,256	-168,310	-135,076	-31,008	-35,148
24.	- Nonmigas	-118,567	-137,857	-132,959	-127,729	-112,189	-26,409	-30,478
25.	- Migas	-38,717	-40,810	-43,297	-40,582	-22,887	-4,597	-4,669
26.	2. Pertumbuhan (% yoy)	-	-	-	-	-		
27.	a. Total Ekspor (fob)	27.43	-1.97	-2.81	-3.73	-14.93	-3.58	14.85
28.	- Nonmigas	26.16	-0.83	-2.16	-1.32	-9.96	-2.37	18.09
29.	- Migas	32.83	-6.55	-5.57	-14.40	-40.24	-13.91	-10.44
30.	b. Total Impor (fob)	32.21	13.60	-1.35	-4.51	-18.75	-2.94	7.14
31.	- Nonmigas	28.76	16.27	-3.55	-3.93	-12.17	1.01	8.37
32.	- Migas	52.27	5.41	6.09	-6.27	-43.60	-20.75	-0.26
33.	3. Harga rata-rata ekspor minyak mentah (USD/barel)	109.21	110.88	103.96	95.83	48.79	40.56	46.48
34.	4. Produksi minyak mentah (juta barel per hari)	0.90	0.86	0.83	0.79	0.79	0.83	0.82

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia (2018)

Rekening ini terdiri atas tiga bagian yaitu : (a) neraca perdagangan (*balance of trade*), yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional; (b) neraca jasa (*services balance*), yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa, termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis; (c) neraca transfer unilateral (*unilateral transfers balance*), yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah (misalnya bantuan luar

negeri dan bantuan militer). Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif (kredit), sedang penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif (debit).

**2. Neraca Modal (*capital account*)**

Rekening/neraca modal (*capital account*) merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan (perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi dan surat berharga internasional yang lain) maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara (baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun), dan kekayaan finansial jangka pendek (surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun).

Tabel 1.4  
Neraca Modal (*Capital Account*)

KETERANGAN		2011	2012	2013	2014	2015	2016 Q3*	2016 Q4*
1.	Investasi Langsung	11,528	13,716	12,170	14,733	10,704	6,594	3,541
2.	A. Aset	-9,037	-7,485	-11,112	-10,388	-9,075	466	12,870
3.	1. Modal ekuitas	-5,064	-4,377	-10,953	-9,566	-7,998	-53	13,134
4.	2. Instrumen utang	-3,972	-3,107	-159	-822	-1,076	519	-264
5.	B. Kewajiban	20,565	21,201	23,282	25,121	19,779	6,129	-9,329
6.	1. Modal ekuitas	16,278	18,615	20,004	21,895	18,822	4,448	-8,567
7.	2. Instrumen utang	4,287	2,586	3,278	3,225	957	1,680	-763
8.	a. Penerimaan	53,677	60,871	65,746	80,051	75,588	13,184	12,149
9.	b. Pembayaran	-49,390	-58,284	-62,468	-76,826	-74,631	-11,504	-12,912
10.	Memorandum:							
11.	Investasi langsung berdasarkan arah investasi	11,528	13,716	12,170	14,733	10,704	6,594	3,541
12.	A. Ke luar negeri	-7,713	-5,422	-6,647	-7,077	-5,937	1,586	11,052
13.	1. Modal ekuitas	-3,137	-1,616	-6,679	-5,408	-4,237	-60	13,129
14.	2. Instrumen utang	-4,576	-3,806	33	-1,670	-1,700	1,646	-2,077
15.	B. Di Indonesia (PMA)	19,241	19,138	18,817	21,811	16,641	5,008	-7,511
16.	1. Modal ekuitas	14,350	15,853	15,730	17,738	15,060	4,455	-8,561
17.	2. Instrumen utang	4,891	3,285	3,086	4,073	1,581	553	1,050

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia (2018)

Dengan demikian, transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Investasi asing langsung (*direct foreign investment*): investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Contoh: pembangunan pabrik baru
- b. Investasi portofolio: transaksi terkait aset keuangan jangka panjang (seperti saham dan obligasi) antarnegara yang tidak memengaruhi adanya transfer pengendalian. Contoh: pembelian saham perusahaan negara lain.
- c. Investasi modal lain: transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek.

**Neraca Jasa.** Sesuai dengan namanya, neraca jasa hanya mencatat transaksi-transaksi jasa saja. Neraca jasa meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa

meliputi penjualan jasa angkutan, turisme/pariwisata, asuransi, pendapatan investasi dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit. Impor jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain, termasuk pembayaran bunga, dividen atau keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain.

### 3. *Reserve Account*

*Reserve Account* merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing.

Tabel 1.5  
*Reserve Account*

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016	2016			
						Oct	Nov	Dec	Jan
1 Emas Moneter	3.935.20	3.023.14	3.026.91	2.660.62	2.876.23	3.195.26	2.978.27	2.876.23	2.993.95
2 Special Drawing Rights (SDRs)	2.715.12	2.712.33	2.550.76	2.442.26	1.498.97	1.534.38	1.512.41	1.498.97	1.514.97
3 Reserve Position in the Fund (RPF)	224.30	224.10	210.70	201.80	1.055.74	1.080.63	1.065.21	1.055.74	1.067.01
4 Cadangan Devisa Lainnya	105.906.60	93.427.13	106.073.23	100.626.35	110.930.59	109.226.78	105.910.20	110.930.59	111.314.15
5 Uang Kertas Asing (UKA) dan Simpanan	22.043.72	19.203.71	19.477.18	12.086.43	11.388.36	9.056.02	8.832.12	11.388.36	8.529.62
6 Surat Berharga	83.299.20	73.668.60	86.026.73	87.986.40	98.952.58	99.590.87	96.488.43	98.952.58	102.232.54
7 Tagihan Lainnya	563.68	554.82	569.32	553.52	589.65	579.89	589.65	589.65	551.99
8 Total	112.781.22	99.386.70	111.861.59	105.931.03	116.361.53	115.037.05	111.466.09	116.361.53	116.890.08

### 4. *Lalu Lintas Moneter (Accommodating Transaction)*

Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut *accommodating transaction* sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan *autonomous*, karena timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi *autonomous* adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah.

### 5. *Surplus dan Defisit Neraca Pembayaran*

Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar dari pada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Tabel 1.6 memuat contoh perubahan arus kas pada berbagai transaksi antarnegara.

Tabel 1.6  
Perubahan Arus Kas pada berbagai Transaksi Antarnegara

Transaksi Perdagangan Internasional	Posisi Arus Kas AS	Jurnal
Beberapa waga AS membeli CD melalui internet dari perusahaan di Cina	Arus kas keluar AS	Debit
Pemerintah Meksiko membayar perusahaan konsultan AS atas jasa konsultasi yang diberikan	Arus kas masuk AS	Kredit
Transaksi Perdagangan Internasional	Posisi Arus Kas AS	Jurnal
Investor AS menerima pembayaran deviden dari perusahaan di Prancis atas saham yang dimilikinya	Arus kas masuk AS	Kredit
Kantor kas Negara AS mengirim pembayaran bunga ke perusahaan asuransi Jerman yang membeli obligasi pemerintah AS tahun lalu	Arus kas keluar AS	Debit

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini diberikan contoh proses penghitungan menggunakan angka-angka. Kolom pertama dan keempat menjelaskan operasi tanda untuk penjumlahan. Kolom terakhir adalah nilai transaksi dalam milyar dollar. Perhatikan bahwa total impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor.

Tabel 1.7  
Proses Perhitungan Transaksi di Pos Pembayaran

Tanda		Item	Tanda	Nilai
	(1)	Ekspor barang	+	712
+	(2)	Ekspor jasa	+	292
+	(3)	Penerimaan pendapatan	+	275
=	(4)	Total ekspor dan penerimaan jasa	=	1279
	(5)	Impor barang	-	1263
+	(6)	Impor jasa	-	246
+	(7)	Pembayaran pendapatan	-	259
=	(8)	Total Impor dan pembayawan pendapatan	=	1768
	(9)	Transfer bersih	-	68
	(10)	Saldo neraca berjalan = (4) – (8) – (9)	-	557

Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada setiap pos-pos neraca pembayaran ini. Dalam teori ekonomi internasional, ketidakseimbangan ekspor dan impor menyebabkan ketidak seimbangan pada pos-pos aliran modal. Aliran ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi didalam

negara atau negara partnernya. Beberapa faktor diantaranya suku bunga, nilai tukar, inflasi.

### C. STRUKTUR NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Dari Neraca Pembayaran Indonesia seperti terlihat dalam Tabel 1.1 kita saksikan bahwa dalam neraca pembayaran tersebut dibedakan dalam berbagai kelompok transaksi ekonomi internasional. Penyajian neraca pembayaran yang cukup terperinci seperti yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut kiranya mudah dipahami. Semakin terperinci penyajian data, semakin banyak kemungkinan pengolahannya, yang dengan demikian berarti pula semakin besar kemungkinan pemanfaatannya. Dengan perkataan lain, dapat dikemukakan bahwa dengan penyajian neraca pembayaran yang cukup terperinci seperti yang tercantum pada lampiran tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat memanfaatkan data yang disajikan dalam neraca pembayaran tersebut secara maksimal.

Tabel 1.8  
Contoh Neraca Pembayaran Indonesia (per Juni 2011)

URAIAN		2010 *					2011		ITEMS
		Q1	Q2	Q3	Q4	Year	Q1 *	Q2 **	
I. Transaksi Berjalan		1,936	1,409	1,205	1,093	5,643	2,089	232	I. Current Account
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)	A. Barang 1)	6,954	6,848	7,593	9,232	30,628	8,686	9,728	A. Goods 1)
	- Ekspor	35,088	37,444	39,712	45,830	158,074	45,818	51,460	-Exports
	- Impor	-28,134	-30,596	-32,119	-36,597	-127,447	-37,133	-41,732	-Imports
B. Jasa-Jasa, bersih	1. Nonmigas	5,812	5,881	6,605	9,097	27,395	8,628	10,638	1. Non-Oil & gas
C. Pendapatan, bersih	a. Ekspor	28,511	30,298	32,763	37,845	129,416	37,092	41,991	a. Exports
D. Transfer Berjalan, bersih	b. Impor	-22,699	-24,417	-26,158	-28,747	-102,021	-28,464	-31,353	b. Imports
	2. Minyak	-1,663	-2,140	-1,991	-2,859	-8,653	-3,438	-4,998	2. Oil
A. Transaksi Modal	a. Ekspor	3,556	3,840	3,749	4,547	15,691	4,856	4,979	a. Exports
B. Transaksi Finansial	b. Impor	-5,219	-5,980	-5,740	-7,406	-24,344	-8,293	-9,978	b. Imports
	3. Gas	2,805	3,107	2,980	2,994	11,886	3,495	4,088	3. Gas
	a. Ekspor	3,022	3,306	3,201	3,438	12,968	3,870	4,490	a. Exports
	b. Impor	-217	-200	-222	-444	-1,082	-375	-402	b. Imports
	B. Jasa - jasa	-2,106	-2,275	-2,155	-2,788	-9,324	-2,305	-3,598	B. Services
	1. Ekspor	3,873	4,015	4,334	4,544	16,766	4,456	4,567	a. Exports
	2. Impor	-5,979	-6,291	-6,489	-7,332	-26,090	-6,761	-8,164	b. Imports
	C. Pendapatan	-3,993	-4,262	-5,385	-6,653	-20,291	-5,318	-6,871	C. Income
	1. Penerimaan	444	443	521	482	1,890	579	636	1. Receipts
	2. Pembayaran	-4,436	-4,705	-5,906	-7,134	-22,181	-5,898	-7,508	2. Payments
	D. Transfer berjalan	1,080	1,098	1,151	1,301	4,630	1,027	974	D. Current transfers
	1. Penerimaan	1,815	1,816	1,883	2,057	7,571	1,829	1,838	1. Receipts
	2. Pembayaran	-735	-718	-732	-756	-2,941	-802	-864	2. Payments
II. Transaksi Modal & Finansial		5,590	3,697	7,365	9,550	26,201	6,436	12,518	II. Capital and Financial Account
a. Perubahan Cadangan Devisa	A. Transaksi modal	18	2	4	26	50	1	-	A. Capital account
b. Pinjaman IMF:	B. Transaksi finansial 2)	5,572	3,695	7,361	9,524	26,151	6,435	12,518	B. Financial account 2)

URAIAN	2010 *					2011		ITEMS
	Q1	Q2	Q3	Q4	Year	Q1 *	Q2 **	
- Aset	-3,601	-583	-4,748	2,031	-6,901	-3,307	-1,032	- Assets
- Kewajiban	9,172	4,277	12,109	7,494	33,052	9,742	13,550	- Liabilities
1. Investasi langsung	2,484	2,298	1,684	4,241	10,706	3,041	2,699	1. Direct investment
a. Ke luar negeri	-427	-982	-1,191	-64	-2,664	-1,748	-2,547	a. Abroad
b. Di Indonesia ( PMA )	2,911	3,280	2,875	4,305	13,371	4,789	5,247	b. In indonesia (FDI)
2. Investasi portofolio	6,159	1,089	4,517	1,437	13,202	3,798	5,742	2. Portfolio investment
a. Aset	-409	-152	-1,597	-353	-2,511	-311	-536	a. Assets
b. Kewajiban	6,569	1,241	6,114	1,789	15,713	4,109	6,278	b. Liabilities
1) Sektor publik	6,556	997	4,820	1,154	13,526	4,383	2,964	1) Public sector
2) Sektor swasta	13	244	1,295	636	2,187	-274	3,314	2) Private sector
3. Investasi lainnya	-3,072	308	1,160	3,846	2,243	-404	4,076	3. Other Investment
a. Aset	-2,764	552	-1,960	2,447	-1,725	-1,248	2,051	a. Assets
b. Kewajiban	-308	-244	3,120	1,400	3,968	844	2,025	b. Liabilities
1) Sektor publik	147	-879	1,093	1,395	1,756	95	-1,402	1) Public sector
2) Sektor swasta	-455	636	2,027	5	2,212	749	3,427	2) Private sector
III. Total ( I + II )	7,526	5,106	8,570	10,642	31,844	8,525	12,750	III. Total ( I + II )
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-905	315	-1,616	646	-1,559	-859	-873	IV. Net Errors and Omissions
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	6,621	5,421	6,955	11,289	30,285	7,666	11,876	V. Overall Balance (III+IV)
VI. Cadangan Devisa dan yang terkait 3)	-6,621	-5,421	-6,955	-11,289	-30,285	-7,666	-11,876	VI. Reverses and related items 3)
A. Transaksi Cadangan Devisa	-6,621	-5,421	-6,955	-11,289	-30,285	-7,666	-11,876	A. Reserve Asset Transactions
B. Pinjaman IMF	-	-	-	-	-	-	-	B. Use of Fund credit and Loans
1. Penarikan	-	-	-	-	-	-	-	1. Purchases
2. Pembayaran	-	-	-	-	-	-	-	2. Repurchases
Memorandum:	-	-	-	-	-	-	-	Memorandum:
- Posisi Cadangan Devisa	71,823	76,321	86,551	96,207	96,207	105,709	119,655	- Reserve Assets Position
Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	5.3	5.6	6.3	7.0	7.0	6.0	6.8	In months of imports & official debt repayment
- Transaksi Berjalan (% PDB)	1.2	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	0.1	- Current Account (% GDP)
- Rasio Pembayaran Utang (%)	21.2	23.2	20.3	23.7	22.2	18.0	21.6	- Debt Service Ratio (%)
a.I. Rasio Pembayaran Utang Pemerintah & Otoritas Moneter (%)	5.0	7.2	4.8	6.2	5.8	4.5	5.4	o/w Government & Monetary Authority DSR (%)

Sumber Bank Indonesia (2011) <http://www.bi.go.id>

Untuk kepentingan analisis sering-sering pengelompokan lebih lanjut terhadap transaksi-transaksi ekonomi internasional diperlukan. Pengelompokan lebih lanjut ke dalam pos-pos dasar seperti di bawah ini merupakan suatu cara pengelompokan yang banyak dijumpai dalam buku-buku teks dalam bidang ekonomi internasional. Pos-pos dasar tersebut meliputi berikut ini.

1. Transaksi dagang (*trade*).
2. Barang-barang (*visible trade*).
3. Jasa-jasa (*invisible trade*).
4. Pendapatan modal (*income on investment*).
5. Transaksi-transaksi Unilateral (*unilateral transaction*).
6. Penanaman modal langsung (*direct investment*).
7. Hutang piutang jangka panjang (*long term loan*).
8. Hutang piutang jangka pendek (*shortterm capita*).
9. Sektor moneter (*monetary sector*).

Kita akan menguraikan lebih lanjut mengenai makna pos-pos dasar tersebut di atas. Penggolongan dasar pos-pos tersebut di atas sedikit menyimpang dari susunan neraca pembayaran yang disarankan oleh IMF. Susunan/struktur neraca pembayaran yang disarankan oleh IMF diikuti oleh Bank Indonesia, pos pendapatan modal tergolong dalam pos perdagangan. Susunan dengan model IMF untuk pos neraca barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Neraca barang-barang dan jasa-jasa:

Neraca perdagangan barang (*visible trade*)

1. Barang-barang
2. Emas tidak moneter.
3. Neraca jasa-jasa (*invisible trade*)
  - a. Ongkos pengangkutan dan asuransi
  - b. Ongkos transport lain-lain
  - c. Perjalanan luar negeri
  - d. Pendapatan modal
  - e. Pemerintah, tidak termasuk dalam bagian lain
  - f. Jasa-jasa lainnya.

Pembagian ini didasarkan pada pengelompokan faktor-faktor yang mempengaruhi pos-pos ini. Nilai transaksi pendapatan modal pada dasarnya sangat berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai transaksi perdagangan barang dan jasa maka untuk keperluan analisis, pos pendapatan modal kita lepaskan dari pos perdagangan dan kita tempatkan sebagai suatu pos yang berdiri sendiri.

### 1. Transaksi Dagang

Dalam pos ini dicatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang-barang dan ekspor jasa kita catat dalam pos perdagangan di sebelah kredit, sedangkan transaksi impor barang dan impor jasa-jasa kita catat dalam pos perdagangan di bagian debit. Transaksi perdagangan kita sebut *visible trade*, apabila benda yang kita ekspor atau yang kita impor adalah benda ekonomi yang berujud.

Sedangkan apabila yang kita ekspor atau yang kita impor merupakan penunai jasa, maka transaksi tersebut kita golongkan sebagai *invisible trade* atau transaksi jasa.

Perhatikan contoh berikut ini. Jika sebuah perusahaan mengekspor karet kita ke negara lain maka dalam neraca pembayaran internasional akan dicatat sebagai transaksi kredit pada *visible trade*. Pada neraca pembayaran internasional kita lakukan kredit karena transaksi tersebut merupakan hak kepada penduduk negara kita untuk menerima pembayaran dari penduduk negara yang mengimpornya, dan transaksi tersebut kita anggap sebagai transaksi yang *visible* didasarkan pertimbangan bahwa karet adalah merupakan benda ekonomi yang mempunyai ujud.

Contoh lain, jika perusahaan penerbangan Lion Air membawa orang-orang asing dari Bangkok ke Hongkong misalnya maka transaksi-transaksi yang terjelma merupakan transaksi ekspor jasa; oleh karena itu, kita golongkan sebagai *credit invisible trade transaction* pada neraca pembayaran kita. Impor alat-alat kapital dari luar negeri dalam neraca pembayaran internasional kita golongkan sebagai *debit visible trade transaction*. Seorang penduduk negara kita menggunakan jasa asuransi perusahaan asing, dalam neraca pembayaran internasional kita akan tercatat sebagai *debit invisible trade transaction*.

Impor dan ekspor emas dibedakan antara impor-ekspor emas tidak moneter dengan impor-ekspor emas moneter. Impor-ekspor emas tidak moneter pada umumnya berupa perhiasan dan tergolong dalam transaksi perdagangan. Sebaliknya impor-ekspor emas moneter hanya dilakukan oleh bank sentral, yang untuk Indonesia ialah Bank Indonesia dan tergolong dalam pos transaksi moneter.

Transaksi yang termasuk dalam ongkos transpor lainnya ialah semua ongkos transpor kecuali ongkos pengangkutan barang; antara lain ialah perbaikan kapal, biaya pelabuhan udara atau pelabuhan laut, biaya pos, dan pengeluaran-pengeluaran oleh anak-anak buah kapal. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan asing termasuk kategori ini, kecuali biaya perjalanannya yang masuk dalam kategori perjalanan luar negeri.

Pengeluaran yang termasuk dalam kategori pemerintah tidak termasuk dalam bagian lain ialah semua pengeluaran pemerintah untuk menggaji para pegawainya di luar negeri dan juga semua pengeluaran bantuan militer dengan semua pembiayaannya yang diberikan oleh negara neraca pembayaran kepada negara lain. Ketidaklengkapan angka-angka pada pos ini dengan sendirinya merupakan salah satu unsur pembentuk pos selisih yang tidak diperhitungkan. Transaksi-transaksi yang biasanya masuk dalam kategori jasa-jasa lainnya antara lain ialah biaya langganan publikasi-publikasi luar negeri, film, sewa tanah, dan sewa bangunan.

## 2. Pendapatan Modal

Pos ini meliputi semua transaksi penerimaan pendapatan yang berasal dari penanaman modal kita di luar negeri dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang merupakan akibat adanya modal asing yang tertanam dalam perekonomian

kita. Pendapatan yang kita maksud di sini dapat berbentuk keuntungan, dividen, dan bunga. Keuntungan, dividen, dan bunga yang diterima oleh penduduk negara kita, pada neraca pembayaran internasional kita akan terlihat sebagai transaksi kredit pada pos *income on investment*.

Sedangkan keuntungan, dividen, dan bunga yang dibayar oleh penduduk negara kita kepada penduduk negara lain yang memiliki perusahaan yang tempat kedudukannya dinegara kita atau yang memiliki saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan kita atau yang memiliki surat-surat obligasi yang diterbitkan oleh badan-badan swasta di negara kita ataupun yang diterbitkan oleh pemerintah, atau yang memberikan pinjaman berbunga kepada penduduk negara kita dalam bentuk-bentuk lainnya, semuanya adalah merupakan transaksi debit pendapatan modal pada neraca pembayaran internasional kita. Dalam pos ini kita catat juga laba yang tidak dibagikan dari cabang-cabang perusahaan asing yang ada di negara kita.

### 3. Transaksi *Unilateral*

Transaksi yang tergolong dalam transaksi unilateral antara lain ialah transaksi-transaksi hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Berbeda dengan transaksi jual beli, transaksi hadiah atau *gifts* tidak mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi si penerima barang untuk mengadakan pembayaran harganya kepada si penyerah barang tersebut. Dari segi si pemberi hadiah, transaksi penyerahan barang tidak pula menimbulkan hak kepadanya untuk menerima pembayaran dari si penerima barang. Transaksi yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban secara yuridis adalah merupakan transaksi sepihak yaitu yang biasa disebut transaksi unilateral. Selain *gift* atau hadiah, yang tergolong sebagai transaksi unilateral ialah transaksi-transaksi aids atau bantuan, dan transaksi *unilateral transfer*.

Dari segi akuntansi transaksi-transaksi ini sifatnya hanyalah meniadakan hak menerima atau kewajiban membayar sebagai akibat dikreditnya atau didebitnya pos lain, yang sebenarnya hak menerima pembayaran atau kewajiban membayar tersebut seharusnya tidak ada. Jadi, misalnya seorang penduduk Indonesia mendapat kiriman barang sebagai hadiah ulang tahunnya dari penduduk negara lain, pemerintah kita menerima obat-obatan sebagai sumbangan untuk korban bencana alam yang kita peroleh dari penduduk negara lain, atau pada waktu dulu sesaat saldo bank pemerintah kita di Jepang bertambah sebagai akibat adanya pembayaran pampasan perang Jepang kepadakita maka pos perdagangan atau bank deposits kita debit. Dengan didebitnya pos-pos tersebut berarti kewajiban kita untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara-negara yang kita sebutkan tadi timbul. Akan tetapi, kenyataan yang sebenarnya tidak demikian. Oleh karena itu, dengan maksud untuk menghapus kewajiban yang sudah tercatat tetapi yang sebenarnya tidak ada, pos-pos unilateral kita kredit. Untuk penerimaan hadiah ulang tahun pos *gift* kita kredit, untuk penerimaan obat-obatan oleh Pemerintah *pos aids* kita kredit, dan untuk mengimbangi didebitnya pos *bank deposits*

yang timbul dari adanya penerimaan pampasan perang, pos *unilateral transfer* kita kredit.

#### 4 Penanaman Modal Langsung

Dalam istilah neraca pembayaran internasional yang tergolong sebagai transaksi *direct investment* ialah transaksi jual beli saham dan perusahaan yang diadakan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain dan penanaman modal langsung yang diadakan oleh penduduk suatu negara di negara lain. Bagi suatu negara *direct investment* akan didebit kalau dalam tahun bersangkutan ada di antara penduduknya yang membeli saham dari penduduk negara lain, atau membeli perusahaan dari tangan penduduk negara lain atau mendirikan perusahaan di negara lain.

Sebaliknya, neraca pembayaran internasional suatu negara pos investasi langsungnya akan dikredit apabila di antara penduduknya ada yang menjual saham kepada penduduk negara lain atau apabila ada penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya.

#### 5. Hutang Piutang Jangka Panjang

Transaksi-transaksi yang tercatat pada pos ini meliputi semua transaksi kredit jangka panjang. Pada umumnya yang dimaksud dengan kredit jangka panjang ialah kredit dengan jangka waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Jual beli surat-surat obligasi antara penduduk negara yang memiliki neraca pembayaran internasional dengan penduduk negara lain termasuk dalam kategori ini juga. Dengan demikian, suatu neraca pembayaran pos *long term loan*-nya akan dikredit apabila penduduk negaranya ada yang berhasil menjual surat-surat obligasi (entah surat obligasi tersebut surat obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara lain maupun surat obligasi yang diterbitkan oleh penduduk negara bersangkutan) kepada penduduk negara lain.

Penduduk negara tersebut menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara-negara lain dan apabila penduduk negara tersebut dalam tahun neraca pembayaran mendapatkan pinjaman jangka panjang dari penduduk negara lain. Transaksi-transaksi yang berkebalikan dengan transaksi-transaksi tersebut dengan sendirinya merupakan transaksi debit pada pos *long term loan*. Lebih lanjut transaksi hutang piutang jangka panjang ini bisa dibedakan antara transaksi hutang piutang jangka panjang pemerintah dan transaksi hutang piutang jangka panjang swasta.

#### 6. Hutang piutang Jangka Pendek

Uraian mengenai pos ini sama dengan uraian pos *long term loan*, hanya saja bedanya ialah bahwa dalam pos *long term loan*, transaksi hutang piutang yang dicatat adalah hutang piutang jangka panjang, sedangkan dalam pos *short term capital* transaksi

hutang piutang yang dicatat hanyalah transaksi hutang piutang jangka pendek, yang jatuh temponya tidak melebihi satu tahun.

Transaksi kredit jangka pendek ini pada umumnya terdiri atas transaksi-transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Seperti halnya dengan pos hutang piutang jangka panjang, transaksi hutang piutang jangka pendek dapat pula dibedakan antara hutang piutang jangka pendek pemerintah dan transaksi hutang piutang jangka pendek swasta. Sementara ahli ekonomi menemukan bahwa transaksi hutang piutang swasta merupakan pos yang paling sukar untuk menaksir angkanya, sebab transaksi ini merupakan transaksi yang paling sukar bisa diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, bisa diramalkan bahwa pos ini tendensinya merupakan salah satu pos yang besar peranannya dalam pembentukan angka pada pos selisih yang tidak diperhitungkan.

## 7. Sektor Moneter

Seperti kita ketahui bahwa sektor moneter terdiri atas:

- a. Bank Sentral
  - (1) Hubungan dengan IMF
  - (2) Kewajiban-kewajiban jangka pendek
  - (3) Mutasi cadangan devisa
  - (4) Mutasi cadangan emas moneter
  
- b. Bank-bank Devisa
  - (1) Kewajiban-kewajiban jangka pendek'
  - (2) Mutasi cadangan devisa.

Transaksi-transaksi yang terjadi pada pos sektor moneter pada dasarnya merupakan transaksi-transaksi pembayaran. Yaitu pembayaran terhadap transaksi-transaksi yang tercatat pada *current account* (transaksi-transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral), dan *investment account* (transaksi-transaksi penanaman modal langsung, hutang piutang jangka panjang, dan hutang piutang jangka pendek bukan moneter). Apabila jumlah pengeluaran untuk *current account* dan *investment account* 'perbedaannya merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit pada *monetary sector*.

Pos hubungan dengan *IMF* akan terisi apabila cadangan pada IMF dan saldo SDR (*Special Drawing Right*) mengalami perubahan. Kerja sama antar bank sentral dari berbagai negara memungkinkan mereka dalam batas-batas tertentu saling membantu mengatasi kesulitan likuiditas luar negeri negara-negara anggotanya yang sangat mendesak dan berlangsung tidak lama dengan fasilitas yang disebut *swap*. Transaksi *swap* ini akan tercatat pada pos kewajiban-kewajiban jangka pendek.

Mutasi cadangan devisa merupakan pos di mana dicatat transaksi-transaksi penerimaan dan pemakaian valuta asing. Di samping Dollar Amerika Serikat valuta-valuta asing yang kita pakai dalam transaksi-transaksi pembayaran internasional ialah

Dollar Australia, Shillings Austria, Francs Belgia, Dollar Canada, Kroner Denmark, Mark Jerman, Francs Perancis, Dollar Hongkong, Lire Italia, Yen Jepang, Escudos Portugis, Poundsterling, Dollar Singapura, Kronor Swedia, dan Franc Swiss. Baik untuk bank sentral maupun untuk bank-bank swasta, penerimaan valuta asing dari luar negeri akan merupakan transaksi debit, sedangkan pemakaian valuta asing ke luar negeri merupakan transaksi kredit pada masing-masing pos. Ke dalam pos mutasi cadangan emas moneter dicatat perubahan-perubahan yang terjadi pada besarnya cadangan emas moneter. Apabila terjadi aliran emas moneter ke luar negeri, yang biasa disebut *gold outflow*, pos ini kita kredit, sedangkan sebaliknya kalau ada aliran emas moneter ke dalam negeri, yang biasa disebut juga *gold inflow*, pos ini kita debit.

Berikut ini artikel tentang perdagangan Indonesia pada akhir tahun 2010. Neraca perdagangan Indonesia bulan September 2010 mengalami surplus US\$ 2,5 miliar. Surplus perdagangan ini disumbang oleh surplus perdagangan sektor nonmigas mencapai US\$ 2,6 miliar, sementara perdagangan sektor migas mengalami defisit sebesar US\$ 0,1 miliar. Meskipun kinerja ekspor nonmigas bulan September 2010 mengalami perlemahan, antara lain karena faktor musiman dibanding bulan Agustus, surplus perdagangannya justru mengalami kenaikan sebesar 68 persen.

Dengan kinerja perdagangan periode September 2010, secara kumulatif perdagangan Indonesia periode Januari-September 2010 mengalami surplus sebesar US\$ 13,5 miliar, meningkat 14,2% dari surplus periode yang sama tahun 2009. Surplus perdagangan selama tahun 2010 disumbang oleh surplus perdagangan sektor nonmigas mencapai US\$ 14 miliar, sementara perdagangan sektor migas mengalami defisit US\$ 0,5 miliar.

Surplus neraca perdagangan nonmigas bulan September tertinggi selama 2010. Surplus neraca perdagangan nonmigas bulan September 2010 mencapai US\$ 2,6 miliar, tertinggi selama tahun 2010. Pertumbuhan surplus neraca perdagangan nonmigas (*month to month*) pada September 2010 terhadap September 2009 sebesar 33,4%, sedangkan pertumbuhan September 2010 terhadap Agustus 2010 sebesar 47%. Surplus neraca perdagangan nonmigas dua bulan terakhir tumbuh signifikan.

Ekspor nonmigas bulan September 2010 mencapai US\$ 10,1 miliar, jauh di atas angka rata-rata kinerja ekspor bulanan selama tahun 2008 sebesar US\$ 9 miliar, masa sebelum krisis global. Kinerja ekspor selama September 2010 meningkat 25,2% dibanding periode yang sama tahun 2009. Dengan kinerja ekspor selama September 2010 maka ekspor kumulatif nonmigas periode Januari-September 2010 mengalami peningkatan 34,9% dibanding periode yang sama tahun 2009. Sementara itu, apabila dilihat pergerakannya, performa ekspor Indonesia terus menguat. *Moving average annual growth rate* periode Oktober 2009 sampai September 2010 mengalami kenaikan 30,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selama periode Januari-September 2010 total ekspor mencapai US\$ 110,8 miliar naik 38,3% terhadap periode yang sama 2009, bahkan mendekati nilai ekspor untuk seluruh tahun 2009 sebesar US\$ 116,5 miliar. Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai

US\$ 91,8 miliar naik 34,9% terhadap Januari-September 2009, dan juga mendekati nilai ekspor nonmigas untuk seluruh tahun 2009 sebesar US\$ 97,5 miliar. Kinerja ekspor tahun 2010 kembali pulih setelah selama tahun 2009 mengalami kontraksi. Selama Januari-September 2010 nilai ekspor non migas mencapai US\$ 91,8 miliar, naik 34,9% dari periode yang sama tahun 2009, dan 2,9% lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2008.

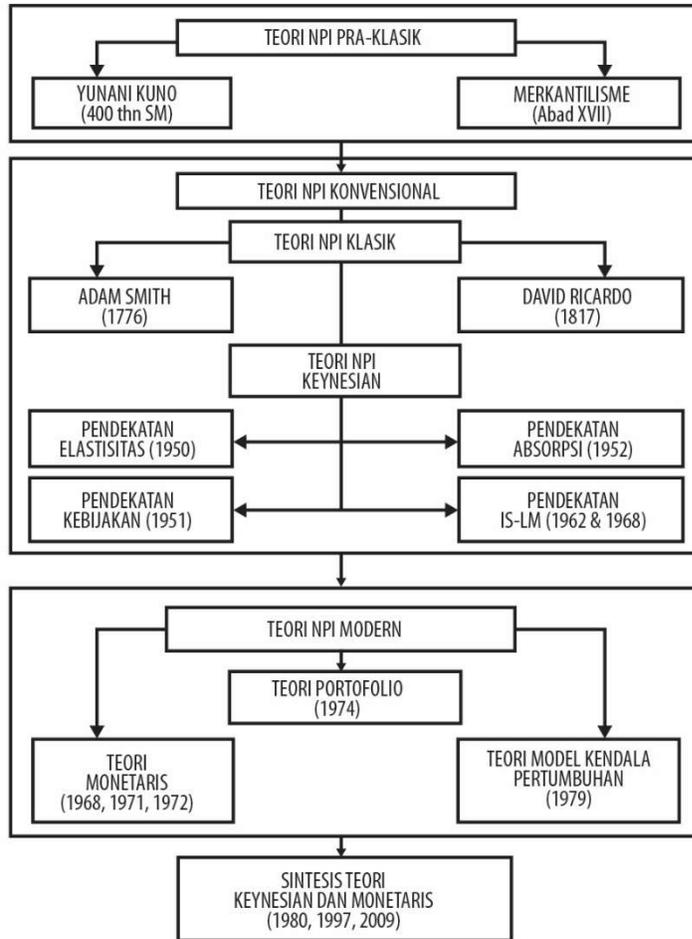
Ekspor nonmigas 2010 mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding sebelum masa krisis (tahun 2008). Peningkatan ekspor nonmigas ini mendorong percepatan pemulihan perdagangan luar negeri, penguatan ekspor nonmigas periode Januari-September 2010 didorong oleh peningkatan ekspor seluruh sektor. Ekspor produk manufaktur mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 34,2% setelah pada tahun 2009 mengalami kontraksi sebesar 25,5%. Sampai dengan Triwulan III tahun 2010 nilai ekspor manufaktur Indonesia naik menjadi US\$ 68,9 miliar. Pulihnya perekonomian dunia dari krisis global mulai terlihat dari adanya peningkatan permintaan produk ekspor manufaktur Indonesia, begitu juga permintaan terhadap produk sektor pertambangan dan pertanian. Meningkatnya nilai ekspor manufaktur didorong oleh menguatnya kinerja ekspor beberapa produk yang naik cukup signifikan. Ekspor produk karet meningkat tajam selama periode Januari-Agustus 2010, sebesar 100,5% karena dipengaruhi oleh selain naiknya volume ekspor (15,7%) juga karena naiknya harga internasional karena berkurangnya suplai akibat musim hujan yang melanda negara-negara produsen utama karet. Sementara itu, ekspor produk otomotif, alas kaki, produk hasil hutan dan kakao masing-masing meningkat sebesar 49,2%, 38,2%, 35,8% dan 29,2%.

Peningkatan ekspor nonmigas Indonesia selama periode Januari-September 2010 terutama ke beberapa negara tujuan mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian negara-negara tersebut setelah krisis global sepanjang tahun 2009. Setelah mengalami perlemahan di tahun 2009, ekspor nonmigas Indonesia ke sepuluh negara memperlihatkan peningkatan tertinggi. Kinerja ekspor ke negara-negara tersebut bahkan meningkat lebih tinggi dari tahun 2008, sebelum krisis. Beberapa negara tersebut merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti Jepang meningkat 45,8%, Cina naik 56,1%, Jerman 30,7% dan Australia 36,5% serta beberapa negara ASEAN menguat 38%-68%.

#### **D. PERKEMBANGAN TEORI DAN NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL**

Landreth, *et al.* (2002) mengelompokkan teori-teori tentang Neraca Pembayaran Internasional menjadi: 1) Teori NPI Pra Klasik (*Pre-Classical Theory*), 2) Teori NPI Klasik (*Classical Theory*), 3) Teori NPI Keynesian (*Keynesian Theory*), 4) Teori NPI Neo-Klasik atau Moneteris (*Neo-Classical Theory or Monetary Theory*) dan 5) Teori

Model Kendala Pertumbuhan (*The Balance of Payments Constrained Growth Model Theory*).



Gambar 1.11  
Perkembangan Teori Neraca Pembayaran Internasional

Masing-masing teori tersebut memiliki perbedaan dari aspek asumsi, variabel, dan proposisinya (lihat juga Snowden, *et al.*, 1995; Sukirno, 2000 dan McCombie, *et al.*, 2002). Pemikiran atau pandangan masing-masing kelompok tersebut dapat diuraikan satu per satu di bawah ini. Secara skematis perkembangan pemikiran teori NPI seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.11.

Tabel 1.9  
Rangkuman Pemikiran Teori NPI Pra-Klasik dan Klasik

Teori NPI	Asumsi	Variabel Pengaruh NPI	Proposisi	Penulis
A. Pra-Klasik Tokoh-tokohnya : Aristoteles Xenophone Thomas Mun David Hume	1. Berdagang didorong motif faedah dan laba 2. Kemakmuran negara berasal dari surplus perdagangan luar negeri	Tarif, kuota, subsidi dan pajak. Namun menurut David Hume tidak perlu campur tangan pemerintah	Apabila ekspor dan impor dikendalikan dengan tarif, kuota, subsidi dan pajak, maka neraca perdagangan selalu surplus	Landerth, 1989; Nopirin, 1998; Thirwall, 2003; Vera, 2005; Aizenman, 2005
B. Klasik Tokoh-tokohnya : Adam Smith David Ricardo	3. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian minim. 5. Upah dan harga fleksibel	Variabel harga tenaga kerja (upah) dan perbandingan biaya per unit barang	Negara akan menerima manfaat maksimal dari perdagangan bebas dengan mengandalkan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif	Alexander, 1998; Landerth, 1998; Ackay, 2001; Nelson, 2002; Deliarnov, 2005; Razmi, 2005

### 1. Pemikiran Teori NPI Pra\_Klasik

Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata. Salah seorang murid Plato yaitu Aristoteles (384-322 SM) yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai (*value*) dan harga (*price*). Kontribusi paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang (*exchange of commodities*) dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Pemikiran inilah yang selanjutnya mendorong negara (kota) pada waktu itu melakukan perdagangan antara negara (kota). Berdagang adalah aktivitas yang tidak didorong oleh motif faedah (*use*) saja tetapi juga oleh motif laba (*gain*).

Masih menurut Landreth, et al. (2002) bahwa pandangan Aristoteles tersebut semakin dipertegas oleh Xenophon (440-355 SM) melalui karya utamanya yaitu *On the Means of Improving the Revenue of the State of Athens*. Xenophon menguraikan bahwa negara Athena yang mempunyai beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Xenophon melihat bahwa Athena sangat potensial untuk menarik para pedagang dan pengunjung dari daerah-daerah lain. Untuk itu perlu pelayanan yang baik agar makin banyak orang yang mau datang berdagang dan

berkunjung. Dengan demikian makin besar pula pendapatan negara dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa spirit merkantilisme sudah ada sejak masa Yunani Kuno. Spirit yang menganjurkan orang melakukan perdagangan dengan negara-negara lain.

Nopirin (1998) menyatakan bahwa seiring dengan terjadinya perkembangan yang sangat pesat dalam organisasi kegiatan ekonomi dan masyarakat pada abad ke- XVII, berkembanglah suatu paham merkantilisme yang mempunyai pengaruh cukup besar di Eropa khususnya di Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda.

Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak.

Lebih lanjut Nwaobi (2003) mengemukakan bahwa bagi penganut merkantilisme sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, kebijaksanaan perdagangan waktu itu sangat mendorong ekspor dan sedapat mungkin berusaha agar impor dibatasi. Tercatat salah seorang tokoh merkantilis yang mempunyai karya tulis tentang perdagangan luar negeri yaitu Thomas Mun (1571- 1641). Karya tulisnya adalah *A Discourse of Trade, From England unto The East-Indies* (1621) dan *England's Treasure by Foreign Trade or, The Balance of Our Foreign Trade is the Rule of Our Treasure* (1664).

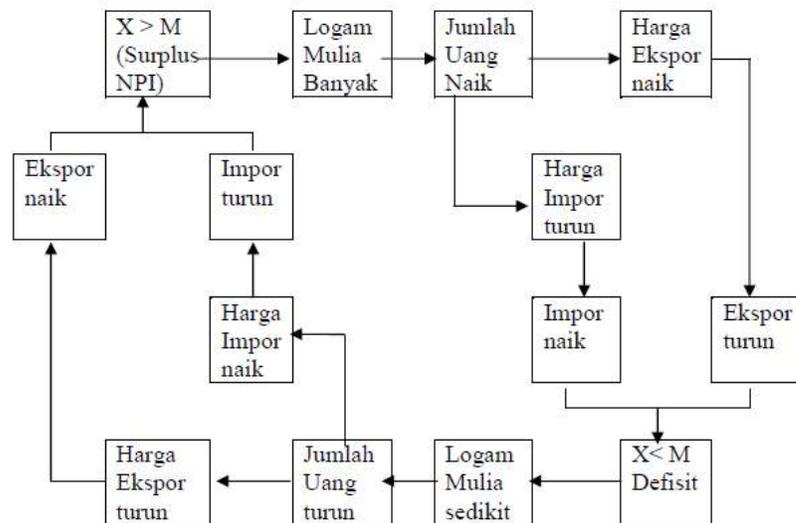
Thomas Mun mengemukakan bahwa salah satu prinsip neraca perdagangan adalah harus surplus. Mun merekomendasikan perdagangan internasional harus diatur oleh pemerintah dengan cara menekankan pembatasan impor dan secara terus menerus berusaha mendorong ekspor. Thomas Mun yang memberikan kontribusi pemikiran tentang pentingnya surplus perdagangan internasional. Menurutnya negara harus mengendalikan ekspor dan impor melalui kebijakan tarif, kuota, subsidi, pajak dan alat-alat lainnya yang dapat membuat neraca perdagangan selalu surplus.

Vera (2005) menyatakan bahwa menurut Thomas Mun Neraca Perdagangan dipengaruhi oleh variabel-variabel kebijakan perdagangan internasional melalui instrumen yaitu tarif, kuota, subsidi dan pajak. Instrumen-instrumen kebijakan tersebut akan berpengaruh pada komponen biaya dan selanjutnya berpengaruh pada harga barang impor dan ekspor. Bagi pelaku impor, apabila tarif impor dinaikkan, maka secara relatif harga impor akan lebih mahal dibanding harga ekspor. Dengan demikian konsumen domestik akan cenderung beli barang domestik atau tidak mau beli barang impor. Pada saat yang sama orang luar negeri cenderung membeli barang negara tersebut. Akibatnya impor menurun dan ekspor meningkat yang pada akhirnya dapat menyebabkan neraca perdagangan berada pada posisi surplus. Demikian sebaliknya akan menyebabkan neraca perdagangan berada dalam posisi defisit. Logika ini berlaku juga bagi instrumen-instrumen kebijakan perdagangan internasional lainnya.

Lebih lanjut Nopirin (1998) mengatakan bahwa David Hume (1711-1776) memiliki pendapat yang berbeda dengan pandangan Thomas Mun di atas. Melalui skema Gambar mekanisme otomatis neraca pembayaran internasional yang ada pada

Gambar 1.12. Hume menunjukkan suatu mekanisme tanpa pemerintah dalam mengatur perdagangan internasional. Karena secara otomatis melalui mekanisme aliran emas NPI akan seimbang kembali. Pemikiran Hume dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Of the Balance of Trade*.

Hamdy (2009) mengutip pandangan Hume yang menyatakan bahwa jika suatu negara surplus NPI, maka akan terjadi aliran emas masuk yang menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Bertambahnya jumlah uang beredar ini mendorong masyarakat meningkatkan permintaan barang domestik. Apabila persediaan barang domestik belum mencukupi, maka akan terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang domestik (inflasi). Dengan meningkatnya harga barang domestik, maka orang luar negeri akan mengurangi pembelian barang dari negara tersebut. Pada saat yang sama ada masyarakat domestik yang cenderung membeli barang dari luar negeri yang harganya relatif murah dibanding harga domestik. Akibatnya nilai ekspor negara tersebut menurun dan nilai impornya meningkat sampai keseimbangan NPI kembali tercapai.



Gambar 1.12  
Mekanisme Otomatis Neraca Pembayaran Internasional  
Menurut David Hume

Dari pandangan David Hume tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa neraca perdagangan suatu negara dapat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar melalui mekanisme harga barang impor dan harga barang ekspor. Apabila jumlah uang beredar naik, harga domestik naik, dan harga barang impor turun. Hal ini menyebabkan ekspor turun dan impor naik. Akibatnya posisi neraca perdagangan akan defisit. Demikian sebaliknya, asumsi yang digunakan adalah tanpa campur tangan pemerintah.

Kelemahan pemikiran Hume tersebut terletak pada asumsi bahwa hanya jumlah uang beredar yang mempengaruhi posisi neraca perdagangan. Hume tidak mempertimbangkan faktor lain seperti tingkat pendapatan negara yang melakukan perdagangan internasional. Selain itu, mekanisme otomatis (*autohomechanism*) memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri. Hal ini justru dapat memperburuk kondisi neraca perdagangan suatu negara.

## 2. Pemikiran Teori NPI Klasik

Deliarnov (2005) menulis bahwa Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi Klasik. Alirannya disebut mashab Klasik sebab gagasan-gagasan yang ditulis Adam Smith sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Melalui karyanya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776) Adam Smith menganjurkan agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian (*laissez faire laissez passer*). Pendapat ini memang sudah dibicarakan Francis Quesnay (1694-1774) dari aliran Fisiokrat sebelumnya.

Lebih lanjut Deliarnov (2005) mengatakan bahwa walaupun Adam Smith sejalan dengan kaum Fisiokrat tentang keyakinan mereka bahwa kemakmuran suatu negara bukanlah melalui perdagangan luar negeri, namun Adam Smith tetap memiliki kontribusi pemikiran dalam perkembangan perdagangan luar negeri itu sendiri. Kontribusinya berkaitan dengan adanya perdagangan bebas atau *free trade* yang akan memberikan manfaat tambahan maksimal bagi suatu negara. Menurut Adam Smith bahwa perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien. Negara mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain yaitu karena mempunyai keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam produksi barang tersebut.

Menurut Landreth, *et al.* (2002) dasar yang mendukung pandangan tersebut adalah teori Adam Smith yang dikenal dengan sebutan Teori Nilai (*Value Theory*). Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. *Pertama*, nilai guna (*value in use*); *kedua*, nilai tukar (*value in exchange*). Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Untuk mengukur tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena ketrampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, Smith menggunakan harga tenaga kerja sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang. Perbedaan tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang, digunakan Smith untuk mematok harga. Harga seperti itu disebut sebagai harga alami (*natural price*). Pada zaman modern ini disebut harga keseimbangan jangka panjang.

Boediono (1999) menunjukkan perbedaan pandangan David Ricardo (1772-1823) dengan Adam Smith. Perbedaan pandangan tersebut dijelaskan melalui teori

keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Melalui karyanya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817) Ricardo menjelaskan beberapa teori yaitu : *land rent*, *labor theory of value*, *natural wages* dan *comparative advantage theory*. Dengan teori *comparative advantage* David Ricardo mampu menjelaskan terjadinya kegiatan perdagangan antarnegara walaupun negara tersebut efisien dalam memproduksi semua jenis barang (yang menurut teori keunggulan mutlak tidak mungkin terjadi). Menurut David Ricardo suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Dengan adanya keunggulan komparatif bisa menimbulkan manfaat perdagangan (*gain from trade*) bagi kedua belah pihak, dan selanjutnya akan mendorong timbulnya perdagangan antarnegara. Keunggulan komparatif ditemukan dari perbandingan biaya per unit nominal dari masing-masing barang. Pandangan David Ricardo inilah yang dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas.

Pandangan kedua tokoh tersebut di atas berimplikasi pula pada pengendalian perdagangan luar negeri khususnya untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Seiring dengan ide David Hume dari kelompok Mekantilisme, para ekonom Klasik berkeyakinan bahwa NPI akan selalu atau otomatis mencapai keseimbangan melalui mekanisme pasar. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika neraca perdagangan adalah variabel-variabel yang mempengaruhi ekspor dan impor melalui sektor riil. Asumsi yang digunakan oleh kaum Klasik adalah adanya fleksibilitas upah dan harga.

Kegagalan teori Klasik menghadapi persoalan depresi besar di tahun 1930 membuktikan bahwa *automatic mechanism* kadang sulit diterapkan dalam dunia nyata. Kalau toh ada pasti membutuhkan *time lag* yang cukup panjang. Hal ini berimplikasi semakin besarnya risiko dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan neraca perdagangan apabila tidak seimbang.

### 3. Pemikiran Teori NPI Keynesian

Menurut Duasa (2000) bahwa pemikiran Kelompok Keynesian tentang NPI didasari pada teori makro ekonomi John Maynard Keynes (1883-1946). Berbeda dengan para ekonom Klasik, melalui karyanya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) Keynes tidak meyakini adanya mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis atau fleksibel. Keynes berpendapat bahwa NPI tidak secara otomatis mencapai keseimbangan melainkan diperlukan intervensi pemerintah. Rangkuman pemikiran Teori Keynesian ditampilkan dalam Tabel 1.10 berikut ini.

Tabel 1.10  
Rangkuman Pemikiran Teori NPI Keynesian

Teori NPI	Asumsi	Variabel Pengaruh NPI	Proposisi	Penulis
Keynesian Tokoh-tokohnya : J.M.Keynes Robinson S.Alexander James Meade Tinbergen M.J.Fleming R.A Mundell	1. NPI tidak otomatis Mencapai keseimbangan, tetapi butuh intervensi pemerintah 2. Upah dan harga bersifat kaku 3. Analisis bersifat jangka pendek	Pendapatan Nasional, Tingkat Bunga Nilai Tukar Valuta Kredit Domestik	Kenaikan tingkat bunga dan Nilai Tukar Valuta dapat meningkatkan NPI. Kenaikan Pendapatan Nasional dan Kredit Domestik dapat menurunkan NPI	Frenkel, 1993; Mendoza, 1995; Bahmani, 1997; Nopirin, 1998; Mrak, 2001; Filho, 2002; Perraton,2003; Hansen, 2004; Lopez, 2005

Berbeda dengan asumsi Klasik, Keynes justru berpendapat bahwa tingkat upah dan harga memiliki sifat yang kaku dan negara selalu berhadapan dengan persoalan pengangguran. Dalam perkembangannya teori NPI kelompok Keynesian terbagi dalam beberapa pendekatan yakni:

a. *Pendekatan Elastisitas*

Menurut Nopirin (1998) bahwa pendekatan elastisitas atau *the elasticity's approach* yang dikemukakan oleh Robinson pada tahun 1950 menerapkan analisis Marshallian tentang elastisitas penawaran dan permintaan komoditas individual pada analisis ekspor dan impor secara keseluruhan. Ditambahkan oleh Kavous (2003) bahwa penekanan utama dari Robinson adalah efek dari devaluasi valuta asing terhadap NPI. Menurut pendekatan ini devaluasi akan memperbaiki NPI. Dalam konteks ini, umumnya diasumsikan bahwa ekspor tergantung pada harga ekspor dan impor tergantung pada harga impor. Menurut pendekatan ini efek kebijakan devaluasi terhadap neraca perdagangan tergantung pada empat elastisitas yaitu : elastisitas luar negeri permintaan ekspor, elastisitas dalam negeri dari penawaran, elastisitas luar negeri dari penawaran impor dan elastisitas dalam negeri dari permintaan impor. Untuk kasus khusus apabila diasumsikan bahwa semula neraca perdagangan adalah nol dan skedul dua penawaran adalah elastis secara infinitif maka kondisi elastis dari pengaruh devaluasi terhadap perbaikan neraca perdagangan adalah merupakan jumlah dari elastisitas permintaan yang sama dengan satu. Hal ini disebut *Marshall Lerner Condition*.

Dengan asumsi Keynesian tentang kekakuan upah dan tingkat harga (*sticky wages and prices*), Nwaobi (2003) mengemukakan bahwa devaluasi dapat mengubah tingkat harga barang domestik secara relatif terhadap harga barang luar negeri.

Selanjutnya akan ada perubahan dalam dasar penukaran (*terms of trade*), pada pasar luar negeri dan domestik. Kemudian hal itu berpengaruh pada produksi dan konsumsi, yang pada gilirannya berpengaruh pada neraca perdagangan.

Penting untuk diperhatikan dua karakteristik dari kasus khusus pendekatan elastisitas (Kavous, 2003 dan Nwaobi, 2003 ).

- 1) Berbagai pengaruh dari devaluasi pada permintaan barang domestik diasumsikan lebih ditentukan oleh variasi output dan kesempatan kerja dari pada oleh harga relatif, sehingga variasi output pada NPI dianggap sebagai hal yang kedua. Hal ini mungkin karena asumsi elastis penawaran adalah infinitif. Kelemahan pendekatan ini tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang NPI pada waktu pasca Perang Dunia II, yang ditandai dengan kesempatan kerja penuh. Dalam kondisi yang demikian ekspor tidak bisa/atau sukar untuk dinaikkan dengan tindakan devaluasi.
- 2) Hubungan antara NPI dengan penawaran uang dan antara penawaran uang dengan permintaan agregat diabaikan. Hal ini mungkin karena adanya asumsi adanya pengangguran sumber daya yang menurut Keynesian tidak dipengaruhi oleh uang. Kelemahan dari pendekatan elastisitas adalah karena mengabaikan aliran modal. Walaupun pendekatan elastisitas berusaha mengarahkan pemerintah untuk memperbaiki NPI, tetapi sayang hanya difokuskan pada neraca perdagangan saja. Hal ini disebabkan oleh analisis Keynesian lebih condong pada pengendalian sisi permintaan agregat saja (*aggregate demand management*). Oleh karena itu, analisis pendekatan ini cenderung menggunakan analisis keseimbangan parsial.

*b. Pendekatan Absorpsi*

Menyadari kelemahan yang ada pada pendekatan elastisitas, Nopirin (1998) menulis bahwa S.Alexander pada tahun 1952 memperkenalkan pendekatan baru yakni pendekatan absorpsi atau *absorption approach*. Lebih lanjut Nwaobi (2003) menyatakan bahwa Alexander melihat NPI dari sudut pandang perhitungan Pertumbuhan Ekonomi. Menurut pendekatan ini efek devaluasi terhadap NPI tergantung dari dampak devaluasi terhadap pendapatan dan absorpsi. Alexander mendefinisikan pendapatan sebagai suatu nilai hasil penjumlahan dari absorpsi yang terdiri dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah dan ekspor dikurangi impor. Devaluasi akan memperbaiki NPI apabila kenaikan output lebih besar daripada absorpsinya.

Apabila terjadi pengangguran sumber daya maka mekanisme berikut akan terjadi: pengaruh devaluasi adalah meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Hal ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pada produksi (pendapatan) melalui mekanisme *multiplier*. Jika total pengeluaran naik tidak terlalu tajam, maka akan terjadi perbaikan pada neraca perdagangan. Jadi, neraca perdagangan akan identik dengan peningkatan perolehan ekonomi melalui selisih antara total produksi dengan total absorpsi barang

dan jasa, sehingga sama dengan akumulasi keseimbangan surat berharga atau uang. Dalam situasi pengangguran, devaluasi tidak hanya memperbaiki NPI, tetapi juga membantu mendorong ekonomi menuju kondisi kesempatan kerja penuh.

Apabila negara pada kondisi kesempatan kerja penuh maka devaluasi tidak bisa diharapkan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan pendapatan riil. Hal ini tergantung pada kemampuan untuk mengurangi absorpsi.

Menurut Alexander bahwa peningkatan dalam tingkat harga sebagai konsekuensi dari devaluasi akan cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi melalui pengaruh keseimbangan riil sebagai suatu referensi pengurangan pengeluaran masyarakat dalam rangka menutup kembali stok uang kas mereka yang hilang karena kenaikan harga.

Akan tetapi pada kondisi kesempatan kerja penuh, devaluasi tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan perubahan pada keseimbangan secara keseluruhan. Penurunan pengeluaran masyarakat guna menjaga keseimbangan uang masyarakat harus didukung oleh kebijakan deflasi domestik. Menurut Dornbusch, *et al.* (2004) kebijaksanaan tersebut dapat dikatakan sebagai *expenditure switching* and *expenditure reducing policies*. Hal ini disebabkan oleh neraca perdagangan tidak dapat diperbaiki melalui peningkatan output. Dengan demikian, pendekatan absorpsi hanya berlaku untuk kondisi pengangguran sumber daya.

#### c. Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan ekonomi atau *the economic policy approach = policy mix* yang dikemukakan oleh James Meade dan Tinbergen pada tahun 1951 merupakan upaya untuk menggabungkan pendekatan elastisitas dan absorpsi.

Menurut Nopirin (1998) bahwa teori ini merupakan kombinasi dari *expenditure reducing* dan *expenditure switching* (lihat juga Mankiw, 2003; Dornbusch, *et al.*, 2004 dan Kavous, 2005). *Expenditure reducing* dapat dilakukan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, sedangkan *expenditure switching* dapat dicapai melalui pengaturan langsung perdagangan dan kurs. Kedua kebijakan tersebut untuk mencapai keseimbangan internal (*full employment*) dan eksternal (keseimbangan perdagangan).

Menurut Nopirin (1998) kebijakan campuran (*policy mix*) yang harus diambil pemerintah sangat tergantung pada kondisi awal dari satu negara. Ada 4 kemungkinan kondisi awal seperti terlihat pada Tabel 1.11 di bawah ini.

Tabel 1.11  
Kemungkinan Kondisi Awal Suatu Negara

Kondisi Awal	Kondisi Internal	Kondisi Eksternal
1	Inflasi	Surplus
2	Inflasi	Defisit
3	Pengangguran	Defisit
4	Pengangguran	Surplus

d. *Pendekatan IS-LM*

Perkembangan selanjutnya teori NPI dikemukakan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming pada tahun 1960-an. Era ini adalah era sistem nilai tukar tetap. Modelnya merupakan variasi dari model IS-LM untuk ekonomi yang sudah terbuka.

Menurut Dornbusch, *et al.* (2004) anggapan yang digunakan untuk teori ini adalah negara kecil, sehingga negara tersebut tidak dapat mempengaruhi harga dan pendapatan dunia. Ada 3 persamaan yang dibangun dalam rangka menurunkan persamaan NPI.

Ketiga persamaan tersebut adalah: persamaan untuk kurva IS, persamaan untuk kurva LM dan persamaan untuk kurva NPI.

Menurut Soediyono (2000) persamaan kurva IS diturunkan dari keseimbangan pasar barang. Lebih lanjut Dornbusch, *et al.* (2004) mengutip pandangan J.M.Keynes bahwa keseimbangan tersebut terjadi apabila Pendapatan Nasional (*National Income = Y*) sama dengan pengeluaran agregat (*Agregat Expenditure = AE*). Pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran konsumsi (*Consumption Expenditure = C*), pengeluaran investasi (*Investment = I*), pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure = G*), selisih ekspor (*Export = X*) dengan impor (*Import = M*). Berdasarkan hal-hal tersebut maka keseimbangan tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan dasar sebagai berikut.

$$\text{Kurva IS : } Y = C + I + G + X - M$$

Lebih lanjut Soediyono (2000) menyatakan bahwa dalam persamaan tersebut, C (pengeluaran konsumsi) tergantung pada Y (pendapatan nasional), I (pengeluaran investasi) dipengaruhi oleh *i* (tingkat bunga), M (pengeluaran impor) dipengaruhi Y (pendapatan nasional) dan X (pengeluaran ekspor) dipengaruhi R (kurs valuta asing). Variabel G (pengeluaran pemerintah) dianggap variabel exogenous. Melalui proses substitusi matematis maka akan ditemukan persamaan kurva IS perekonomian terbuka.

Persamaan kurva LM diturunkan dari keseimbangan pasar uang. Masih menurut Keynes bahwa keseimbangan tersebut terjadi apabila permintaan uang (*demand for money = M*) baik untuk transaksi (*transaction motive*), berjaga-jaga (*precautionary motive*) dan spekulasi (*speculative motive*) sama dengan penawaran uang (*money supply = M*). Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dapat disebut L1 dan permintaan untuk spekulasi dapat disebut L2. Dengan demikian, menurut Dornbusch, *et al.* (2004) keseimbangan pasar uang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Kurva LM : } M = L_1 + L_2$$

L1 (permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga) dipengaruhi oleh Y (Pertumbuhan Ekonomi). L2 (permintaan uang untuk spekulasi) dipengaruhi oleh *i* (tingkat bunga). M (penawaran uang) dianggap variabel exogenous. Melalui proses

substitusi matematis maka akan ditemukan persamaan kurva LM perekonomian terbuka.

Persamaan Neraca Pembayaran Internasional (NPI) merupakan penjumlahan dari NTB (surplus Neraca Transaksi Berjalan) dengan NTMF (surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial). Dengan menggunakan proses substitusi matematis Soediyono (2000) dan Dornbusch, *et al.* (2004) menulis persamaan NPI sebagai berikut.

$$\text{Kurva NPI : } NPI = NTB + NTMF$$

NTB (Neraca Transaksi Berjalan) tergantung pada pendapatan domestik dan luar negeri. NTMF (Neraca Transaksi Modal dan Finansial) tergantung pada suku bunga riil. Kenaikan pendapatan nasional akan memperburuk NTB. Kenaikan suku bunga di atas tingkat dunia akan menarik modal dari luar dan akan memperbaiki NTMF.

Mankiw (2003) menyatakan bahwa dengan mobilitas modal sempurna, sedikit saja perbedaan suku bunga akan memicu arus modal yang tak terbatas. Itu menunjukkan bahwa dengan mobilitas sempurna, bank sentral tidak dapat melakukan kebijakan moneter independen dalam sistem nilai tukar tetap. Apabila sebuah negara menaikkan suku bunganya (kebijakan moneter ketat), segera pemilik portofolio di seluruh dunia memboyong kekayaan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang baru. Hasilnya terjadi arus modal masuk yang besar, NPI mengalami surplus besar. Orang asing ingin membeli aset domestik, cenderung menyebabkan nilai tukar mengalami apresiasi dan memaksa bank sentral melakukan intervensi agar nilai tukar konstan. Bank sentral membeli valuta asing dengan valuta domestik. Intervensi ini menyebabkan persediaan mata uang domestik meningkat. Akibatnya, kontraksi moneter awal berbalik. Proses akan berakhir ketika suku bunga dalam negeri terdorong ke tingkat awal.

Kesimpulannya bahwa di bawah sistem nilai tukar tetap dan mobilitas modal sempurna, sebuah negara tidak dapat melakukan kebijakan moneter independen. Suku bunga tidak dapat bergerak keluar dari rata-rata yang berlaku di pasar internasional. Setiap upaya kebijakan moneter independen akan menyebabkan pergerakan modal dan diperlukan intervensi hingga suku bunga kembali ke rata-rata suku bunga dunia.

Cho (2003) mengkritik pendekatan di atas dengan menyatakan bahwa ketegaran di dalam penggunaan kebijakan fiskal kadangkala memakan waktu lama karena harus melalui suatu proses politik. Oleh karena itu, pendekatan *policy mix* ini hanya berlaku untuk jangka pendek.

#### 4. Teori Portofolio Modern

Teori NPI portofolio dikembangkan berdasarkan konsep model keseimbangan umum untuk ekonomi terbuka. Hal ini menurut Nopirin (1998) sesuai pernyataan McKinnon, Branson, Myhrman, Kouri & Porter. Ciri utama teori ini adalah memasukkan konsep pemilihan portofolio sebagai bagian dari analisis NPI. Dalam

analisisnya keseimbangan aset dan pendapatan dianalisis secara simultan. Branson menggunakan model seleksi portofolio Markowitz-Tobin untuk menjelaskan alokasi kekayaan antara aset luar negeri dan aset domestik. Nilai aset luar negeri sama dengan proporsi tertentu aset luar negeri terhadap stok kekayaan individu. Menurut Branson bahwa nilai proporsi aset luar negeri dipengaruhi oleh tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan risiko yang diperhitungkan. Nopirin (1998) merumuskan model Branson sebagai berikut.

$$\frac{B_f}{w} = f(r_d, r_f, risk)W$$

Keterangan dari masing-masing identitas tersebut adalah:

- W = jumlah total kekayaan individu yang berasal dari aset luar negeri dan domestik.  
 B<sub>f</sub> = aset luar negeri berupa surat-surat berharga pasar modal internasional.  
 r<sub>d</sub> = tingkat bunga dalam negeri.  
 r<sub>f</sub> = tingkat bunga luar negeri  
 risk = risiko karena memegang aset luar negeri.  
 $\frac{B_f}{w}$  = proporsi aset luar negeri terhadap total kekayaan.

Pendekatan portofolio menyatakan bahwa nilai tukar ditentukan oleh jumlah uang domestik, jumlah permintaan obligasi domestik, dan luar negeri dan jumlah penawarannya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa para individu mendapat bunga dari surat-surat berharga yang mereka pegang bukan dalam bentuk uang. Persamaan aliran modal dapat diperoleh dengan cara mencari turunan pertama fungsi di atas pada kedua sisinya, sehingga lebih lanjut Branson menulis persamaan:

$$\frac{B_f}{w} = f(r_d, r_f, risk, W) \Delta W + f_{r_d} W \Delta r_d + f_{r_f} W \Delta r_f + f_{risk} W \Delta risk + f_w \Delta W + \mu$$

Keterangan tambahan:

$\mu$  = kesalahan pengganggu.

Komponen pertama pada sisi sebelah kanan merupakan efek aliran dari pertumbuhan portofolio dan aliran modal, sementara komponen kedua merupakan efek stok dari penyesuaian portofolio. Dalam situasi empiris, apabila data kekayaan tidak ada maka efek aliran diabaikan. Selanjutnya peneliti menggunakan bentuk persamaan sebagai berikut.

$$B^f + a_0 + a_1 \Delta r_d + a_2 \Delta r_f + a_3 \Delta risk + \mu$$

Whitesell (2003) mengungkapkan bahwa Kouri dan Porter mengkritik model Branson ini oleh karena beberapa hal yaitu :1) dapat timbul kesalahan statistik yaitu persamaan simultan yang bias, 2) walaupun model Branson memiliki fondasi mikro yang sangat kuat, namun tidak mudah diterapkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi makro seperti efek fluktuasi pendapatan pada neraca modal dan hubungan antara neraca transaksi berjalan dengan neraca modal.

Oleh karena itu, menurut Nopirin (1983) bahwa Kouri dan Porter mengembangkan suatu model yang berdasarkan pada sintesis dari model Branson dengan teori NPI Moneteris yang dikembangkan oleh Mundell pada tahun 1968 dan Johnson pada tahun 1971 dan 1972. Dalam model ini, aliran modal dipandang sebagai suatu mekanisme yang dapat memindahkan kelebihan permintaan uang domestik.

Variabel-variabel bebas dalam model mereka adalah: perubahan pendapatan nasional, NTB, perubahan instrumen-instrumen keuangan domestik dan perubahan tingkat bunga internasional. Hasil utama mereka adalah, fluktuasi pendapatan merupakan variable penting yang mendorong permintaan uang dan kebijakan moneter memiliki efek yang kuat dalam neraca modal.

## 5. Teori NPI Moneteris

Paralel dengan perkembangan teori Portofolio, Mundell pada tahun 1968 dan Johnson pada tahun 1971 dan 1972 mengembangkan pendekatan moneter terhadap NPI. Nwaobi (2003) menyatakan bahwa aslinya pendekatan ini dikembangkan oleh Polak dan rekannya di Lembaga Keuangan Internasional (*International Monetary Fund* = IMF) pada tahun 1950. Kemudian pendekatan ini dikembangkan pada era awal 1960-an dan 1970-an oleh Mundell (1968) dan Johnson (1972).

Mundell dalam Blejer (1995) mengemukakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam rangka menjaga keseimbangan eksternal. Hal itu menurutnya disebabkan oleh kebijakan moneter dapat memperbaiki baik neraca transaksi berjalan (*current account*) maupun neraca modal (*capital account*) pada NPI. Dengan bantuan mahasiswa pascasarjana di Universitas Chicago, Mundell, dan Johnson mengembangkan pendekatan moneter modern sebagai alternatif pendekatan tradisional.

Lebih lanjut Kavous (2005) mengatakan bahwa ciri utama pendekatan ini adalah memandang neraca pembayaran internasional sebagai fenomena moneter. NPI didefinisikan sebagai perubahan dari pada cadangan internasional (*International Reserve*) suatu negara. Pendekatan ini dalam analisisnya lebih mengutamakan pos atau rekening *below the line* yang merupakan rekening moneter. Dengan demikian, NPI dipandang sebagai satu keseluruhan, baik transaksi berjalan maupun lalu lintas modal (lihat juga Duasa, 2000; Nwaobi, 2003).

Nopirin (1983) mengemukakan bahwa dasar utama pendekatan ini adalah anggapan adanya stabilitas dalam permintaan akan uang serta pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi (lihat juga Djauhari, 2003 dan Kavous, 2003 & 2005). Tindakan sterilisasi artinya tindakan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan

pengaruh NPI terhadap jumlah uang beredar (JUB). Caranya, apabila terdapat surplus dalam NPI maka pemerintah akan melakukan kebijakan pengurangan jumlah uang untuk mencegah pengaruh surplus ini terhadap JUB, misalnya dengan menjual surat-surat berharga.

Dengan tindakan tersebut surplus NPI tidak akan menyebabkan naiknya JUB. Pengaruh NPI terhadap JUB hanya terjadi apabila suatu negara memakai sistem kurs tetap. Hal ini oleh karena di dalam sistem kurs berubah-ubah, NPI yang surplus atau defisit dapat menyebabkan kurs valuta asing turun atau naik. Dengan dasar anggapan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi maka surplus atau defisit dalam NPI sifatnya sementara. Artinya, surplus atau defisit yang menyebabkan JUB bertambah atau berkurang akan timbul sampai kelebihan permintaan atau penawaran uang hilang (pasar uang menjadi seimbang). Oleh karena itu, NPI yang tidak seimbang merupakan refleksi dari ketidakseimbangan dalam pasar uang. NPI yang deficit merupakan refleksi dari adanya kelebihan JUB dan sebaliknya surplus sebagai refleksi kelebihan permintaan akan uang. Di dalam jangka panjang keseimbangan pasar uang (dengan demikian juga NPI) akan terjadi secara otomatis. Akan tetapi menurut Kavous (2005) apabila pemerintah melakukan tindakan sterilisasi (menyimpang dari anggapan pendekatan moneter) maka surplus atau defisit NPI akan terjadi terus menerus.

Lebih lanjut Nusantara (2000) mengemukakan bahwa di samping kedua anggapan tersebut di atas (adanya permintaan akan uang yang stabil dan pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi), sejumlah penulis lain menambahkan beberapa anggapan bahwa upah dan harga, bebas berubah sehingga output dalam jangka panjang akan selalu dalam keadaan *full-employment*. Konsekuensinya, proses penyesuaian NPI melalui perubahan pendapatan (pendekatan Keynes) tidak penting. Anggapan lain, yakni adanya substitusi sempurna antara barang konsumsi dan modal (termasuk surat-surat berharga). Sebagai konsekuensi anggapan ini, harga atau tingkat bunga di dalam negeri akan sama atau paralel dengan luar negeri, sehingga hanya akan berlaku hukum satu harga saja (*law of one price*). Penganut kedua anggapan terakhir ini sering disebut *global monetarists* (lihat juga Richards, 1994).

Menurut Nopirin (1983) dasar utama dari pendekatan moneter adalah asumsi permintaan uang yang stabil dan aliran ke luar (masuk) moneter berkaitan dengan surplus (defisit) NPI tidak disterilisasi. Persamaan NPI menurut pendekatan Moneteris diturunkan dari permintaan uang, penawaran uang, dan keseimbangan pasar uang. Persamaan-persamaan dasarnya adalah sebagai berikut.

Permintaan uang ( $M_d = \text{money demand}$ ) dipengaruhi oleh tingkat harga ( $p = \text{price}$ ), pendapatan nasional ( $Y = \text{national income}$ ) dan tingkat bunga ( $i = \text{interest rate}$ ). Penawaran uang ( $M_s = \text{money supply}$ ) merupakan nilai angka pengganda uang ( $m = \text{money multiplier}$ ) dikalikan dengan uang inti ( $RM = \text{reserve money}$ ). Uang inti terdiri dari kredit domestik neto ( $DC = \text{net domestic credit}$ ) dan cadangan internasional ( $R = \text{net international reserve}$ ). Keseimbangan pasar uang akan terjadi apabila permintaan

uang sama dengan penawaran uang ( $M_d = M_s$ ). Dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} M_d &= (Y, P, i) \\ M_s &= mRM \\ RM &= DC + R \\ M_s &= M_d \end{aligned}$$

dimana:

$$\begin{aligned} M_d &= \text{permintaan uang} \\ M_s &= \text{penawaran uang;} \\ P &= \text{tingkat harga;} \\ RM &= \text{Reserve Money;} \\ R &= \text{cadangan internasional;} \\ m &= \text{angka pengganda uang;} \\ DC &= \text{kredit domestik.} \end{aligned}$$

Dalam perekonomian yang stabil (*stationary steady state*), model ini berimplikasi bahwa NPI sama dengan nol (*balance*). Dalam rangka menjamin *non-zero reserve flows*, model tersebut diformulasi ulang dalam bentuk konsep untuk Negara yang mengalami pertumbuhan (*steady state growth*). Kita gunakan lambang  $\Delta$  sebagai identitas dari tingkat persentase pertumbuhan suatu variabel. Dengan demikian, persamaan dapat ditulis kembali menjadi (Kavous, 2003 & 2005):

$$\begin{aligned} \Delta M_d &= \Delta m + \Delta(R + D) \\ \Delta M_d &= \Delta m + \left[ \frac{R}{R+D} \right] \Delta R + \left[ \frac{D}{R+D} \right] \Delta D \end{aligned}$$

Apabila  $eX$  menyatakan elastisitas dari permintaan uang karena perubahan  $X$  maka persamaan pertumbuhan permintaan uang adalah:

$$\Delta M_d = \Delta P + eY + e_i \Delta_i$$

Apabila digabungkan kedua persamaan tersebut maka akan ditemukan kondisi keseimbangan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta P + eY \Delta Y + e_i \Delta_i &= \Delta m + \left[ \frac{R}{R+D} \right] \Delta R + \left[ \frac{D}{R+D} \right] \Delta D \\ \left[ \frac{R}{R+D} \right] \Delta R &= \Delta P + eY \Delta Y + e_i \Delta_i - \Delta m - \left[ \frac{D}{R+D} \right] \Delta D \end{aligned}$$

Persamaan di atas merupakan persamaan *reserve flow* yang dikembangkan oleh Johnson pada tahun 1972. Persamaan inilah yang menjadi dasar bagi semua analisis jangka panjang.

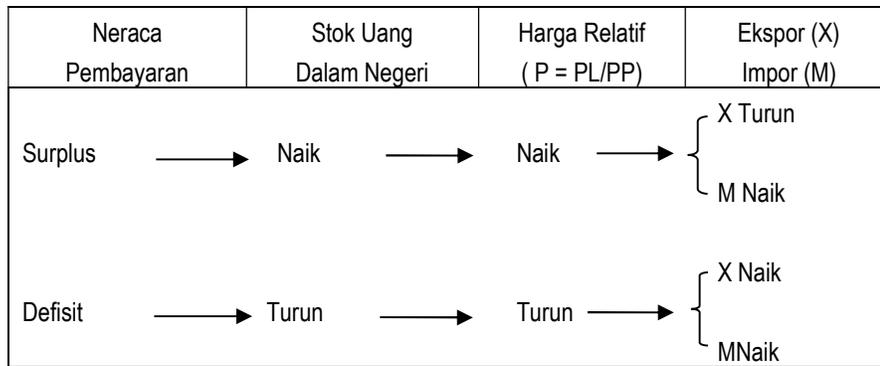
Hasil penurunan formula di atas menunjukkan ada perbedaan yang menyolok antara berbagai teori Keynesian sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan NPI. Berdasarkan salah satu teori yang diturunkan dari analisis multiplier menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memperburuk NPI melalui pertumbuhan impor relatif atas ekspor. Teori ini mengabaikan pengaruh permintaan uang pada penawaran ekspor dan permintaan impor dan aliran surat-surat berharga internasional. Menurut pendekatan modern bahwa kredit domestik akan cenderung memperbaiki NPI. Hal ini terjadi dengan menstimulasi investasi dan meningkatnya produktivitas sehingga dapat menurunkan harga domestik dibandingkan dengan harga luar negeri. Kondisi ini yang dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan (NTB) melalui proses substitusi barang domestik atas barang luar negeri di pasar domestik dan luar negeri (Nelson, 2002; Johnson, 1976 dalam Kavous, 2005).

## 6. Mekanisme Penyesuaian Otomatis

Secara khusus mekanisme-mekanisme penyesuaian otomatis neraca pembayaran dapat dibagi menjadi tiga mekanisme atau proses. Ketiga proses penyesuaian ini sama-sama pentingnya dalam praktek, sehingga tidak ada yang bisa diabaikan dalam rangka mengoreksi ketidakseimbangan neraca pembayaran dengan baik. Dalam kenyataan kita selalu menjumpai bahwa ketiganya saling kait-mengait dan saling bekerja berdampingan satu sama lain. Ketiga mekanisme itu adalah (Salvatore, 1997 & Boediono, 1999):

### a. Mekanisme Harga

Mekanisme Hume adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran lewat perubahan harga-harga. Mekanisme harga ini bekerja secara penuh dalam arti bias membawa kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali dalam sistem standar emas penuh. Pada hakikatnya, mekanisme Hume masih bekerja dalam sistem-sistem moneter lain, hanya saja tidak secara penuh. Dalam sistem-sistem lain tak bisa diharapkan bahwa mekanisme harga (Hume) saja bisa membawa neraca pembayaran ke arah posisi keseimbangan kembali.



Sumber: Boediono (2000)

Gambar 1.13  
Skema Mekanisme Harga

Mekanisme harga dapat dilihat pada Gambar 1.13. Mekanisme harga bekerja sebagai berikut; seandainya karena sesuatu hal ekspor tiba-tiba meningkat sehingga terjadi surplus neraca pembayaran. Emas akan mengalir ke dalam negeri, stok uang di dalam negeri meningkat, dan selanjutnya tingkat harga di dalam negeri menjadi lebih tinggi daripada harga di luar negeri. Akibat selanjutnya, adalah impor cenderung naik dan ekspor turun. Jadi, baik impor maupun ekspor bereaksi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan tingkat harga.

Mekanisme tersebut merupakan rangkaian dari dua tahap proses penyesuaian. Tahap yang pertama adalah peningkatan harga dalam negeri dan penurunan harga luar negeri, yang berakibat menurunnya harga relatif P. Tahap pertama ini didasarkan atas teori kuantitas, yaitu bahwa tingkat harga berubah sejalan dengan perubahan stok uang.

Tahap yang kedua adalah reaksi dari ekspor (X) dan impor (M) terhadap perubahan P tersebut. Logika tahap ini didasarkan pada teori penawaran-permintaan dan elastisitas harga. Dalam contoh sistem standar emas dianggap bahwa kedua tahap penyesuaian berjalan sempurna.

Dalam kenyataan berbagai faktor bisa menghambat bekerjanya proses penyesuaian pada masing-masing tahap tersebut. Sebagai contoh, pada tahap pertama surplus neraca pembayaran tidak otomatis berarti stok uang di dalam negeri naik. Kemungkinan besar pemerintah tidak menginginkan stok uang meningkat terlalu banyak demi kestabilan harga di dalam negeri. Pemerintah bisa mengenakan, misalnya, pajak ekspor. Bila ini terjadi maka stok uang di dalam negeri tidak akan meningkat sebanyak dalam sistem standar emas penuh, sehingga harga dalam negeri tidak meningkat setinggi yang diperlukan untuk menyeimbangkan kembali X dan M. Contoh yang lain, apabila pada tahap penyesuaian yang kedua X dan M mempunyai elastisitas yang rendah terhadap perubahan P. Dalam hal ini perubahan X dan M tidak akan mencapai keseimbangan baru, atau walaupun sampai pada posisi itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Demikian sebaliknya, apabila terjadi defisit dalam neraca

pembayaran. Inti dari uraian di atas adalah bahwa mekanisme penyesuaian neraca pembayaran lewat harga bisa efektif apabila:

1. tingkat harga cukup fleksibel, yaitu bisa naik atau turun dengan mudah apabila stok uang berubah;
2. elastisitas X dan M terhadap perubahan P cukup tinggi.

b. *Mekanisme Pendapatan*

Mekanisme ini didasarkan atas teori makro Keynes, khususnya dilandaskan atas proses *multiplier* dalam teori tersebut. Seandainya sesuatu hal penerimaan ekspor negara kita meningkat  $\Delta X$ . Seperti halnya kenaikan pengeluaran pemerintah ( $\Delta G$ ) atau kenaikan investasi ( $\Delta I$ ) maka kenaikan penerimaan ekspor ini akan menimbulkan kenaikan pendapatan agregat ( $\Delta Y$ ) melalui proses pelipat. Perubahan itu adalah:

$$\left[ \frac{1}{1+b} \right] * \Delta X \text{ di mana } b \text{ adalah } \textit{marginal propensity to consume}.$$

Kenaikan pendapatan agregat ini tentu saja mempengaruhi besarnya impor suatu negara. Semakin tinggi pendapatan semakin besar pula jumlah yang diimpor. Dalam bentuk fungsi matematis dapat ditulis  $M = mY$ , di mana  $m$  adalah *marginal propensity to import*.

Kenaikan pendapatan agregat sebesar  $\Delta Y$  di atas akan diikuti dengan kenaikan impor kita dengan  $m\Delta Y$ . Apabila digabungkan dengan persamaan untuk proses pelipat di atas, maka dapat diperoleh rumus yang menunjukkan berapa kenaikan impor ( $\Delta M$ ) yang diakibatkan oleh kenaikan ekspor ( $\Delta X$ ). Dalam persamaan matematis dapat ditulis:

$$\Delta M = \left[ \frac{m}{(1-b)} \right] * \Delta X$$

Dari persamaan ini bisa dilihat bahwa kenaikan impor ( $\Delta M$ ) akan sama dengan kenaikan ekspor ( $\Delta X$ ) hanya apabila:  $m = 1 - b$  atau  $b + m = 1$ . Bila syarat ini dipenuhi maka kenaikan ekspor secara otomatis, melalui mekanisme pendapatan, akan meningkatkan impor sejumlah yang persis sama., sehingga keseimbangan neraca pembayaran akan tercapai kembali. Ini berarti bahwa mekanisme pendapatan bisa secara otomatis mengembalikan neraca pembayaran ke posisi keseimbangannya kembali apabila terjadi perubahan keadaan, seperti misalnya kenaikan ekspor.

Apakah syarat tersebut bisa dipenuhi dalam kenyataan? Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa syarat tersebut tidak bisa dipenuhi. Dalam kenyataan, yang sering dijumpai adalah bahwa:  $b + m < 1$  atau  $m < 1 - b$ . Mekanisme pendapatan saja biasanya tidak bisa diandalkan untuk mengembalikan neraca pembayaran pada posisi keseimbangannya apabila terjadi perubahan keadaan. Kesimpulan ini senada dengan

kesimpulan mengenai mekanisme harga di atas. Baik mekanisme harga maupun mekanisme pendapatan masing-masing hanyalah satu aspek dari mekanisme penyesuaian total bagi neraca pembayaran.

c. *Mekanisme Moneter*

Mekanisme Hume sebenarnya bukanlah murni mekanisme harga. Sebelum harga naik atau turun, terjadi penyebabnya yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri. Apabila terjadi surplus maka uang akan mengalir masuk ke dalam negeri, sehingga stok uang di dalam negeri bertambah. Apabila terjadi defisit maka uang akan mengalir keluar negeri, sehingga stok uang dalam negeri menurun. Perubahan stok uang ini selanjutnya mengakibatkan perubahan tingkat harga. Cara kerja Mekanisme Moneter dapat dilihat pada Tabel 1.12 di bawah ini.

Tabel 1.12.  
Skema Mekanisme Moneter

Neraca Pembayaran	Stock Uang	Tingkat bunga	Pengeluaran	Pendapatan	Impor
Surplus	Naik	Turun	$(+)(\Delta I)$	$(+)(\Delta Y) = \frac{[(1)(1-b)]}{(\Delta I)}$	$(+)(\Delta M) = \frac{[(m)/(1-b)]}{(\Delta I)}$
Defisit	turun	Naik	$(-)(\Delta I)$	$(-)(\Delta Y) = \frac{[(1)(1-b)]}{(\Delta I)}$	$(-)(\Delta M) = \frac{[(m)/(1-b)]}{(\Delta I)}$

Sumber: Boediono (1999)

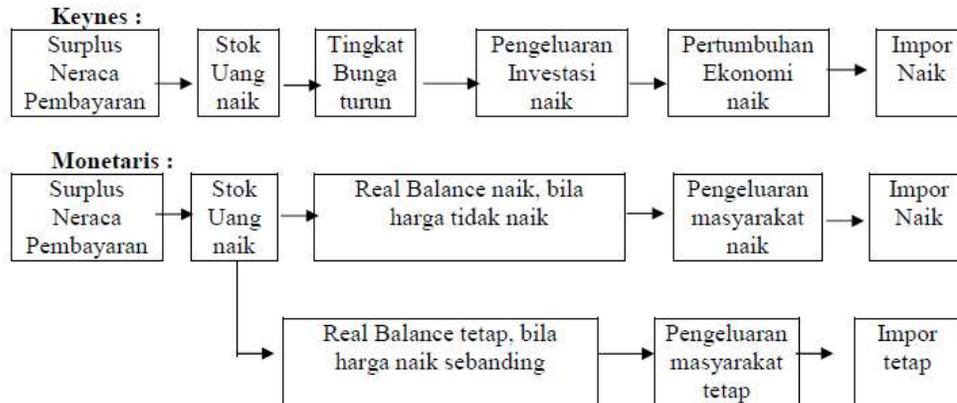
Namun sebenarnya naik dan turunnya stok uang tidak langsung mempengaruhi harga, tetapi mempengaruhi pengeluaran agregat negara itu. Baru kemudian kenaikan/penurunan pengeluaran agregat akan mempengaruhi tingkat harga, setelah pengeluaran ini bertemu dengan penawaran agregat di pasar barang. Mekanisme moneter juga erat kaitannya dengan mekanisme pendapatan. Dalam teori makro dijelaskan bahwa tingkat pengeluaran agregat akhirnya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan agregat. Meskipun mekanisme moneter sangat berhubungan dengan kedua mekanisme sebelumnya, namun secara konseptual harus dibedakan dari mekanisme harga maupun mekanisme pendapatan.

Contoh pada saat terjadi kenaikan ekspor selain menaikkan Pertumbuhan Ekonomi melalui proses multiplier, kenaikan ekspor tersebut mempunyai konsekuensi terhadap stok uang beredar. Surplus neraca pembayaran cenderung meningkatkan stok uang yang beredar di dalam negeri. Penambahan suplai uang ini selanjutnya mempunyai pengaruh di pasar uang berupa penurunan tingkat bunga. Menurunnya tingkat bunga selanjutnya akan merangsang pengeluaran investasi ( $\Delta I$ ) yang kemudian, melalui proses multiplier, meningkatkan pendapatan agregat, dan pengeluaran agregat.

Mekanisme moneter yang diuraikan di atas mengikuti pola pemikiran teori makro Keynes. Khususnya tentang anggapan bahwa perubahan stok uang yang beredar mempengaruhi pasar uang dalam bentuk tingkat bunga, selanjutnya perubahan dalam pengeluaran investasi dan selanjutnya melalui proses pelipat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan akhirnya tingkat impor. Namun, menurut ekonom yang lain bahwa bekerjanya mekanisme moneter tidaklah seperti itu. Menurut mereka, kenaikan stok uang harus dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi dengan tingkat harga. Masyarakat memegang uang sebagai daya beli, artinya kita tidak melihat uang yang kita pegang dalam artian nominal saja, tetapi juga dalam arti riil. Apabila harga-harga naik dua kali lipat maka sebetulnya uang yang dipegang sebagai daya beli (uang riil) telah menurun menjadi separuhnya. Ini yang disebut *real balance* atau *money supply in real terms*.

Apabila masyarakat beranggapan bahwa *real balance* yang mereka pegang terlalu besar maka mereka cenderung untuk mengubah stok uang menjadi barang. Sebaliknya, mereka akan cenderung mengurangi belanja barang apabila jumlah *real balance* yang mereka pegang lebih kecil daripada yang mereka inginkan.

Apabila terjadi kenaikan ekspor, efek moneternya tergantung pada apa yang terjadi dengan *real balance* masyarakat. Kenaikan ekspor tersebut akan mengakibatkan kenaikan stok uang nominal di dalam negeri. Apabila kemudian tingkat harga di dalam negeri meningkat, misalnya karena masyarakat mengalami kenaikan pendapatan ( $\Delta Y$ ) sedang jumlah barang yang tersedia tidak bertambah sejalan dengan itu maka kenaikan stok uang nominal tersebut belum tentu berarti kenaikan *real balance* masyarakat. Bila *real balance* tidak meningkat maka pengeluaran masyarakat pun tidak meningkat, dan pengeluaran masyarakat untuk barang impor pun tidak meningkat. Dalam keadaan seperti ini surplus neraca pembayaran yang diakibatkan oleh adanya  $\Delta X$ , tidak akan hilang. Sebaliknya, apabila tingkat harga di dalam negeri tidak meningkat oleh adanya  $\Delta X$  tersebut maka *real balance* masyarakat meningkat, kemudian tingkat pengeluaran masyarakat meningkat dan selanjutnya impor meningkat ( $\Delta M$ ). Dalam keadaan seperti ini maka akibat akhir dari mekanisme moneter menurut golongan Monetaris sama dengan apa yang diramalkan oleh golongan Keynes. Secara ringkas mekanisme moneter menurut golongan Keynes dibandingkan dengan konsepsi golongan Monetaris dapat dilihat pada Gambar 1.14 di bawah ini.



Sumber: Boediono (1999)

Gambar 1.14  
Perbandingan Antara Mekanisme Keynes dan Moneter

Yang mana yang dianggap benar, menurut Boediono (1999) tergantung pada keadaan khusus negara yang diamati. Akan tetapi seperti halnya dalam teori moneter, nampaknya mekanisme Keynes didasarkan atas adanya pasar uang yang cukup berkembang, sehingga kenaikan stok uang tidak secara langsung mempengaruhi pengeluaran masyarakat, tetapi lebih dahulu lewat pasar uang. Sebaliknya, mekanisme Moneteris nampaknya lebih mencerminkan keadaan negara yang belum mempunyai pasar uang yang telah cukup berkembang. Dalam keadaan ini, bila ada kenaikan stok uang warga masyarakat tidak akan mempertimbangkan apakah tambahan uang tersebut akan dipegang dalam bentuk uang tunai atau obligasi (surat berharga) karena surat berharga memang belum banyak tersedia atau digunakan. Yang dilakukan adalah mempertimbangkan apakah akan dipegang sebagai uang tunai ataukah sebagai barang. Oleh karena itu, hubungan antara stok uang dan pengeluaran masyarakat lebih langsung sifatnya.

#### E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Secara umum, aliran perdagangan internasional terjadi akibat agen ekonomi memperoleh tujuan utama perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam praktiknya, arus perdagangan internasional memerlukan kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Adanya kesepakatan perdagangan antarnegara, terutama kesepakatan perdagangan bebas seperti AFTA, AFTA+China, GATT, NAFTA, dan lain sebagainya berguna untuk menghapus kekhawatiran tingginya resiko yang ditimbulkan oleh berbagai hal diantaranya resiko negara, resiko nilai tukar, resiko suku bunga dan lain sebagainya. Kesepakatan pada kasus integrasi ekonomi Eropa terjadi penyatuan mata uang pada negara-negara Eropa sebagai respon untuk

mengurangi dampak fluktuasi dan volatilitas nilai tukar bagi produsen dan konsumen Eropa.

Ketidaksepakatan dalam perdagangan sering terjadi karena kepentingan sepihak negara terhadap negara lain. Dalam hal kebijakan perdagangan internasional, pemerintah turut menentukan perusahaan mana yang akan memperoleh sebagian besar pangsa pasar dalam industri. Kebijakan bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, melindungi pekerja lokal, meningkatkan pendapatan penduduk, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun kesepakatan perdagangan telah mengurangi bea masuk dan kuota, sebagian besar negara tetap mempertahankan batasan perdagangan atas produk tertentu guna melindungi perusahaan domestik negara tersebut.

Kurs mata uang juga dapat dijadikan sebagai kebijakan suatu negara. AS dan negara-negara di Eropa pernah protes karena terlalu kuatnya mata uang mereka sehingga barang/jasa mereka menjadi terlalu mahal bagi pembeli asing. Eksportir AS menyatakan tidak dapat bersaing dengan Cina karena mata uang Cina selalu dibuat lemah. Selain kurs, aktivitas *outsourcing* juga merupakan masalah terkait dengan perdagangan. Menggunakan tenaga kerja dari negara lain akan berakibat biaya operasi yang murah namun menimbulkan pengangguran di negara asal dan memengaruhi neraca perdagangan (pembelian jasa negara lain).

Perdagangan internasional dapat memengaruhi perekonomian suatu negara maka penting untuk mengidentifikasi dan mengawasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah inflasi, pendapatan nasional, batasan pemerintah dan kurs mata uang. Beberapa faktor yang mempengaruhi arus perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

1. Inflasi

Jika inflasi suatu negara meningkat (dibandingkan negara rekanan dagangnya) maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan oleh masyarakatnya akan membeli lebih banyak barang di luar negeri (karena tingginya inflasi lokal) dan ekspor negara tersebut menurun.

2. Pendapatan Nasional

Jika pendapatan suatu negara meningkat (dibandingkan negara rekanan dagangnya) maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan riil akan meningkatkan konsumsi yang kemungkinan besar juga meningkatkan permintaan akan barang asing.

3. Batasan Pemerintah

Pemerintah suatu negara dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain. Dengan menggunakan batasan tersebut, pemerintah mengacaukan arus perdagangan. Batasan perdagangan yang paling sering digunakan antara lain adalah bea masuk (pajak atas barang impor sehingga harga barang asing meningkat) dan kuota (jumlah maksimum yang dapat diimpor).

4. **Kurs Mata Uang**  
Jika nilai mata uang suatu negara meningkat (dibandingkan negara rekanan dagangnya) maka saldo neraca berjalan akan turun. Hal ini disebabkan oleh bertambah mahalannya barang-barang yang di ekspor bagi negara pengimpor sehingga permintaan barang menurun.
5. **Interaksi Antar Faktor**  
Faktor-faktor yang di atas saling berinteraksi. Contohnya, saat inflasi naik, neraca berjalan turun, namun naiknya inflasi juga melemahkan nilai mata uang yang berakibat neraca berjalan naik. Karena itu, dampak inflasi bisa dihilangkan sebagian.

### 1. **Memperbaiki Defisit Neraca Perdagangan**

Defisit neraca perdagangan tidak selalu menjadi masalah karena memungkinkan konsumen negara tersebut memperoleh manfaat karena produk impor menjadi lebih murah dibandingkan produk domestik. Namun, pembelian produk impor menyebabkan berpindahnya ketergantungan pada produk domestik menjadi ketergantungan pada produk asing sehingga pemerintah berupaya memperbaiki defisit neraca perdagangan.

Beberapa metode untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan adalah kebijakan yang meningkatkan permintaan barang domestik dari luar negeri. Permintaan barang domestik dari luar negeri dapat meningkat dengan menurunkan harga barang dilihat dari sudut pandang negara lain (inflasi rendah dan nilai tukar mata uang dikurangi).

Walaupun menurunkan nilai tukar mata uang terlihat rasional untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan, namun ternyata metode tersebut tidak selalu berhasil. Beberapa hal yang dapat menyebabkan metode tersebut gagal adalah:

- a. tindakan balasan pesaing;
- b. melemahnya mata uang lain;
- c. transaksi internasional yang telah diatur sebelumnya (contohnya perjanjian yang sudah disepakati sebelum turunnya nilai mata uang);
- d. perdagangan antarperusahaan (perusahaan yang memang sudah menjalin hubungan kerja sama tanpa menghiraukan nilai mata uang).

Neraca perdagangan akan turun untuk beberapa lama, namun setelah turunnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya daya beli, neraca perdagangan akan naik kembali. Situasi ini disebut dampak kurva J (*J-curve effect*). Penjelasan fenomena kurva J disebabkan oleh elastisitas kurs terhadap impor dan ekspor berbeda. Penyesuaian antara kedua pos ini selalu terjadi sesuai dengan tingkat fundamental ekonomi suatu negara. Suatu negara yang memiliki kebijakan impor tinggi untuk mesin produksinya akan lambat pulih jika terjadi depresiasi nilai tukar. Bentuk kurva J akan panjang mencapai penyesuaian ke kondisi jangka panjang.

## 2. Hubungan antara Neraca Pembayaran dengan Neraca Hutang Piutang Luar Negeri

Setelah transaksi-transaksi ekonomi luar negeri dikelompokkan ke dalam pos-pos dasar neraca pembayaran maka dengan tujuan-tujuan tertentu pos-pos dasar tersebut dapat dikelompok-kelompokkan lagi. Hal yang dibahas dalam sub-bab ini hanya salah satu di antara pengelompokan-pengelompokan tersebut, yaitu satu di antara pengelompokan pos-pos dasar ke dalam neraca transaksi berjalan atau *current account* dan neraca transaksi modal atau *capital account*. Mengenai macam pengelompokan lainnya akan dibahas bersamaan dengan macam analisis yang memerlukan pengelompokan khusus bersangkutan. Pembagian neraca pembayaran ke dalam neraca transaksi berjalan dan neraca transaksi modal yang biasa juga disebut dengan neraca transfer atau *transfer account*, atau *capital account* didasarkan atas ada-tidaknya hubungan langsung antara pos bersangkutan dengan pos yang ada dalam *balance of indebtedness*, yang kita sebut juga neraca hutang piutang luar negeri. Bilamana sebuah pos dasar atau sebuah transaksi secara langsung tidak mengakibatkan berubahnya nilai pos pada neraca hutang piutang luar negeri maka pos atau transaksi tersebut kita masukkan ke dalam neraca transaksi berjalan. Sebaliknya, apabila sebuah pos neraca pembayaran secara langsung mempengaruhi nilai dalam salah satu pos dalam neraca hutang piutang luar negeri maka pos neraca pembayaran tersebut kita masukkan ke dalam kategori neraca transaksi modal, yang kadang-kadang disebut juga sebagai neraca transfer atau *transfer account*.

## 3. Neraca Hutang Piutang Luar Negeri

Kalau neraca pembayaran suatu negara mengikhtisarkan semua transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan dengan penduduk negara lain, *balance of indebtedness* atau neraca hutang piutang luar negeri mengikhtisarkan nilai semua kekayaan penduduk negara tersebut di luar negeri, besarnya hutang piutang penduduk negara tersebut dengan penduduk negara lain, serta harta kekayaan milik penduduk negara lain yang ada dalam perekonomian negara tersebut. Oleh karena yang diperlihatkan oleh *balance of indebtedness* bukannya transaksi ataupun kejadian-kejadian melainkan yang tercantum disitu ialah nilai kekayaan serta hutang piutang maka sebagai dasar waktu yang kita gunakan ialah *saat* atau *moment* tertentu dan bukannya suatu jangka waktu. Pada umumnya, momen atau saat yang dipergunakan ialah awal tahun kalender yaitu tanggal 1 Januari, akhir tahun kalender yaitu tanggal 31 Desember, awal tahun anggaran atau akhir tahun anggaran.

Para ahli ekonomi internasional rupa-rupanya masih belum banyak menaruh perhatian terhadap neraca hutang piutang. Terlepas dari ada tidaknya manfaat penganalisisannya, neraca hutang piutang ini dalam praktek banyak kesulitan untuk menyusunnya. Pertama, soal pengumpulan data yang diperlukan. Pada umumnya, banyak sekali harta kekayaan milik penduduk suatu negara yang berada di negara lain tanpa sepengetahuan pemerintah. Hal mana mungkin disebabkan karena pemerintah

tidak mempunyai administrasi yang cukup memadai untuk dapat melakukan tugas pencatatan termaksud, atau mungkin juga disebabkan para penduduk yang bersangkutan itu secara sengaja merahasiakannya. Selain kelengkapan data yang dikumpulkan masih sangat disangsikan, kita menemui kesulitan pula dalam menentukan nilai-nilainya. Sebagai contoh, misalnya saja PT Caltex, milik penduduk Amerika Serikat yang ada di negara kita. Bagaimanakah caranya kita harus menghitung besarnya nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut? Apakah kita harus menilainya dengan menggunakan nilai-nilai yang didasarkan pada harga-harga pembelinya, atautkah dengan menggunakan harga penjualan saham-saham yang diterbitkannya, atautkah dengan menggunakan harga penjualan perusahaan itu seandainya perusahaan tersebut dijual, atautkah dengan menggunakan harga buku aktiva-aktiva perusahaan, atautkah kita harus menggunakan harga likuidasinya, dan seterusnya. Semua ini dengan sendirinya akan menimbulkan keraguraguan kepada kita mengenai sampai seberapajauhkan neraca hutang piutang yang kita susun dapat kita percaya.

Kalau kita ingat bahwa semua transaksi ekonomi luar negeri tercatat pada neraca pembayaran internasional maka mungkin timbul pertanyaan: Apakah dengan menggunakan angka-angka dalam neraca pembayaran internasional kita dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca hutang piutang luar negeri dengan lebih seksama? Pemikiran semacam ini adalah sangat masuk akal, oleh karena memang benar bahwa transaksi-transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran internasional dapat merupakan faktor yang menyebabkan berubahnya angka-angka dalam neraca hutang piutang luar negeri. Misalnya, saja kalau seorang penduduk Indonesia mengadakan penanaman modal langsung di luar negeri maka pos *direct investment* neraca pembayaran internasional negara kita, kita debit. Pada saat yang bersamaan, neraca hutang piutang bagian yang menunjukkan besarnya kekayaan kita di luar negeri angkanya bertambah besar dengan jumlah yang sarna.

Akan tetapi, di samping pemikiran yang masuk akal tersebut hendaknya kita tidak melupakan kenyataan-kenyataan dalam praktik. Pertama, dapat kita tunjukkan bahwa pencatatan transaksi-transaksi ekonomi luar negeri dalam neraca pembayaran internasional kenyataannya masih selalu kita dapati transaksi yang tidak terlihat oleh pemerintah. Misalnya saja, Amerika Serikat, meskipun merupakan negara yang administrasinya serta sistem pengawasannya boleh dikata paling sempurna dibandingkan dengan negara-negara lainnya, masih juga belum mampu menghindarkan terjadinya pos *errors and omissions* dalam neraca pembayaran internasionalnya. Bagi neraca pembayaran internasional itu sendiri, adanya pos *errors and omissions* ini tidak begitu besar pengaruhnya. Akan tetapi, kalau angka-angka pos neraca pembayaran internasional yang pos *errors and omissions*-nya agak besar digunakan untuk menyusun neraca hutang piutang maka kesalahan yang kita buat dalam suatu neraca hutang piutang akan dapat berlipat ganda. Hal mana disebabkan dalam *balance of indebtedness*, kesalahan tersebut mempunyai sifat kumulatif, sedangkan dalam *balance of payments*, sifat kumulatif tersebut tidak kita jumpai.

Kelemahan yang lain mengenai penyusunan yang hanya didasarkan pada angka-angka dalam neraca pembayaran internasional sebagai sumber dari perubahan-perubahan dalam neraca hutang piutang, perubahan-perubahannya yang terjadi tidak selalu diakibatkan oleh transaksi-transaksi ekonomi luar negeri seperti tercatat dalam neraca pembayaran internasional.

Sebagai contoh misalkan saja, sebuah perusahaan asing di Indonesia terbakar habis. Ini berarti bahwa nilai pos dalam *balance of indebtedness* yang menunjukkan besarnya modal asing dalam perekonomian kita, berkurang. Berkurangnya nilai ini, mungkin sekali tidak kita jumpai dalam neraca pembayaran internasional, hal mana disebabkan dalam hal ini saran sekali tidak terjadi transaksi ekonomi antara penduduk kita dengan penduduk negara pemilik perusahaan tersebut.



### Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) (a) Terangkanlah bagaimana penurunan penawaran uang suatu negara yang disebabkan oleh defisit dalam neraca pembayarannya dapat disterilkan. Mengapa banyak negara sering melakukannya selama periode antara dua perang dunia?
- (b) Terangkanlah bagaimana kenaikan penawaran uang yang disebabkan oleh suatu surplus dapat disterilkan. Mengapa banyak negara sering melakukannya selama periode antara dua perang dunia?
- 2) Sehubungan dengan pos-pos jasa-jasa dari neraca transaksi berjalan, jelaskanlah secara terperinci apa arti dan apa saja yang termasuk dalam (a) perjalanan (*travel*) dan transportasi, (b) penerimaan pendapatan dari investasi Indonesia, (c) transaksi militer dan (d) jasa-jasa lain.

#### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) (a) Negara dapat mensterilkan penurunan penawaran uangnya yang disebabkan oleh defisit neraca pembayaran dengan pembelian surat-surat berharga di pasar bebas. Hal ini mengurangi surat-surat berharga yang disimpan oleh masyarakat dan menambah uang dalam sirkulasi. Selama periode antarperang, banyak negara yang tidak mengikuti aturan permainan akan tetapi mensterilkan defisit, dan mencegah penurunan penawaran uang. Karena penurunan upah dan harga pada umumnya tidak fleksibel maka pengurangan dalam penawaran uang mempunyai dampak

deflasi lebih lanjut terhadap ekonomi, dan setiap negara ingin menghindarinya.

- (b) Suatu negara dapat mensterilkan kenaikan dalam penawaran uang yang disebabkan oleh surplus neraca pembayarannya, melalui penjualan surat-surat berharga. Hal ini menaikkan surat-surat berharga yang dimiliki masyarakat, dan selalu digunakan oleh negara yang mengalami surplus selama periode antara perang untuk mencegah kenaikan penawaran uang mereka. Kenaikan penawaran uang dari suatu kondisi resesi dan surplus telah membantu mengoreksi kedua-duanya. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dalam tahun 1934, memilih mendevaluasi mata uangnya untuk merangsang ekonomi mereka. Hal ini menambah tekanan-tekanan deflasi ke seluruh dunia merupakan kesalahan kebijakan yang serius.
- 2) (a) Perjalanan (*travel*) merupakan pengeluaran dari turis Indonesia di luar negeri untuk makanan, hotel, dan pembelian tanda mata (debit), dan pengeluaran yang sama dari turis luar negeri di Indonesia (kredit). Transportasi merupakan pengeluaran dari penduduk Indonesia (turis, para pengusaha, dan perusahaan-perusahaan) untuk jasa-jasa dari kendaraan luar negeri seperti pesawat udara, kapal laut, kereta api dan seterusnya (debit), dan pengeluaran yang sama dari penduduk luar negeri untuk jasa-jasa dari kendaraan Indonesia (kredit). Indonesia mempunyai saldo debit untuk perjalanan dan transportasi sebesar (-) \$3 milyar dalam tahun 1988.
- (b) Penerimaan pendapatan dari investasi Indonesia di luar negeri adalah pendapatan bunga, dividen, dan keuntungan dari cabang perusahaan yang tidak tergabung dengan perusahaan induk, pendapatan yang diinvestasikan kembali dari cabang perusahaan dan pendapatan lain yang pemilikan aktiva mereka di luar negeri (kredit). Penerimaan pendapatan atas aktiva Indonesia di luar negeri mencapai \$108 milyar dalam tahun 1988. Pembayaran terhadap pendapatan investasi luar negeri di Indonesia, berhubungan dengan pembayaran Indonesia untuk bunga, dividen, dan pendapatan lain atas investasi luar negeri di Indonesia (debit). Dalam tahun 1988 pos ini berjumlah \$106 milyar. Pemasukan kedua pos ini biasanya dilaporkan secara terpisah (bukan hanya saldo keduanya) karena keduanya mempunyai arti yang relatif penting.
  - (c) Transaksi militer merupakan pengeluaran Indonesia di luar negeri untuk menyewa tanah, bangunan, dan fasilitas-fasilitas untuk instalasi militer, untuk pembelian peralatan militer, dan untuk pengeluaran personel Indonesia di luar negeri. Komponen kreditnya adalah pembelian luar negeri dari material militer Indonesia, pembagian biaya dari pemeliharaan pasukan dan instalasi-instalasi militer Indonesia di luar negeri dan latihan militer luar negeri. Dalam tahun 1988, Indonesia mempunyai saldo debit neto sebesar (-) \$5 milyar dalam transaksi militer.

- (d) Jasa-jasa lain merupakan jasa-jasa perbankan, asuransi, broker saham-saham dan jasa-jasa sejenis yang diberikan oleh institusi-institusi Indonesia kepada penduduk luar negeri (kredit) dan penerimaan penduduk Indonesia dari institusi-institusi luar negeri (debit). Pengeluaran kedutaan-kedutaan luar negeri di Indonesia, dimasukkan juga ke dalam kredit, sedangkan pengeluaran Indonesia untuk mempertahankan kedutaan-kedutaannya di luar negeri dimasukkan pada sisi debit. Indonesia mempunyai saldo atas jasa-jasa lain sebesar (+) \$20 milyar dalam tahun 1988.



### Rangkuman

Neraca pembayaran suatu negara merupakan catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antara penduduk dari negara yang melaporkan dan penduduk dari semua negara asing. Masalah-masalah tertentu harus diselesaikan untuk menentukan siapa penduduk, dan apa yang disebut sebagai transaksi. Akan tetapi, setiap cara pelaporan konsisten sesuai dengan tujuannya, selama hal ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai-mana dimaksudkan. Penggunaan neraca pembayaran yang paling penting pada kebanyakan negara adalah untuk menggambarkan secara ringkas keadaan hubungan ekonomi internasional dari suatu negara sebagai suatu panduan bagi kebijakan moneter, fiskal, nilai tukar, dan kebijakan lainnya.

Meskipun secara keseluruhan kredit harus sama dengan debit dalam neraca pembayaran, namun seringkali berguna untuk menarik garis melalui rekening-rekening yang memisahkan beberapa mutasi di atas garis dari yang lainnya yang berada di bawah garis. Dengan melakukan hal ini akan tampak surplus atau defisit dari sisi kredit secara netto di atas garis pemisah. Salah satu prosedurnya adalah pengukuran neraca barang atau, neraca perdagangan yang seringkali dikutip oleh pers, yang merupakan surplus ekspor barang-barang netto saja. Neraca kedua dan terpenting di dalam neraca pembayaran itu adalah transaksi berjalan, yang memisahkan semua arus barang dan jasa serta hadiah yang berada di atas garis, dari semua arus modal dan cadangan yang berada di bawah garis. Surplus transaksi berjalan sama dengan investasi luar negeri netto suatu negara (termasuk akumulasi cadangan), yang dapat juga menunjukkan kesenjangan antara produk nasional dan pengeluaran nasional. Saldo keseluruhan (atau saldo penyelesaian resmi) memusatkan pada persoalan mempertahankan mata uang suatu negara dan kemampuannya untuk membayar berbagai kewajiban. Saldo ini membandingkan akumulasi cadangan dengan pertumbuhan kewajiban lancar kepada pihak luar negeri.

Pusat-pusat keuangan memiliki kecenderungan untuk mengalami hal-hal yang nampak sebagai defisit keseluruhan sambil memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang cukup lama, untuk menaikkan aktiva luar negeri netto mereka. Investasi luar negeri netto ini mengakibatkan posisi investasi internasional yang lebih positif, yaitu suatu persediaan aktiva luar negeri yang semakin meningkat.



## Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Selisih statistik sebesar \$11 milyar telah dimasukkan dalam neraca transaksi internasional Indonesia karena ....
  - A. total kredit melebihi total debit dalam neraca transaksi berjalan dan neraca modal sebesar \$11 milyar dolar
  - B. total debit melebihi total kredit dalam ketiga neraca secara bersama-sama dengan 29,6 milyar dolar
  - C. total kredit melebihi total debit dalam ketiga rekening secara bersama-sama sebesar \$11 milyar dolar
  - D. total kredit melebihi total debit dalam neraca modal dan neraca cadangan pemerintah sebesar \$11 milyar dolar
  
- 2) Bila seorang turis Inggris membelanjakan \$200 pound di New York untuk hotel dan makanan, Indonesia mengkredit kelompok jasa-jasa (perjalanan) dalam neraca transaksi berjalan dan mendebit ....
  - A. cadangan devisa dalam neraca cadangan pemerintahnya
  - B. pos barang dalam neraca transaksi berjalan
  - C. neraca modal
  - D. tidak satu pun dari yang disebut di atas
  
- 3) Suatu defisit atau surplus dalam neraca pembayaran Indonesia juga dapat diukur oleh saldo neto dari perubahan dalam ....
  - A. transaksi cadangan pemerintah Indonesia
  - B. aset pemerintah luar negeri di Indonesia
  - C. aset pribadi orang-orang Indonesia
  - D. aset cadangan Indonesia dan aset pemerintah luar negeri di Indonesia
  
- 4) Konsep dan pengukuran secara tepat suatu defisit dan surplus dalam neraca pembayaran, hanya dapat dilakukan di bawah ....
  - A. sistem kurs baku
  - B. sistem kurs mengambang bebas
  - C. sistem kurs mengambang yang dikendalikan
  - D. semua yang disebut di atas

- 5) Bila perusahaan Indonesia mengimpor barang dari Inggris dan membayarnya dengan menarik saldo pound di bank London maka Indonesia mendebit neraca transaksi berjalan dan mengkredit ...
- A. neraca cadangan pemerintah
  - B. transfer unilateral
  - C. jasa-jasa dalam neraca transaksi berjalan
  - D. neraca modal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) B

### *Tes Formatif 2*

- 1) C
- 2) C
- 3) D
- 4) A
- 5) A

## Glosarium

- Advance payment* : merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional.
- Balance of Payment (Neraca pembayaran)* : adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antarpenduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu.
- Collection* : merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan.
- Credit card (Kartu kredit)* : adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
- Instrumen/alat pembayaran : merupakan media yang digunakan dalam pembayaran.
- L/C : adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir).
- Neraca barang dan neraca jasa : disebut juga neraca transaksi berjalan (*current account*).
- Neraca pembayaran : adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu.
- Pembayaran internasional : adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya.

- Rekening/neraca modal  
(*capital account*) : merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan (perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi dan surat berharga internasional yang lain) maupun untuk membayar barang dan jasa
- Rekening transaksi  
berjalan (*current account*) : merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa.
- Transaksi lalu lintas  
moneter : adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar dari pada impornya.

## Daftar Pustaka

- Amalia, L. (2007). *Ekonomi internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eitman, D. K., Arthur, I. S., & Michael, H. M. (1998). *Multinational business finance*. Reading, Massachussets: Addison-Wesley.
- Hady, H. (1997). *Manajemen keuangan internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, M. (2008). *Manajemen keuangan internasional*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2000). *International economis, theory and policy*. New York, USA: Addison–Wesley Publishing Company.
- Laporan Neraca Pembayaran Bank Indonesia. (2011). [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Jakarta 2011.
- Lindert, P. H. (1991). *International economics*. USA: Richard D. Irwin Inc.
- Lindert, P. H., & Kindleberger, C. P. (1993). *Ekonomi internasional*. (Burhanuddin, A., Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Madura, J. (2006). *Corporate finance international* (edisi 8). Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Salvatore, D. (1993). *International economics*. New York: MacMillan Publishing Company.
- Tucker, A. L. (1991). *Financial futures, options, and swaps*. St. Paul: West Publishing.